



**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP
ASET TETAP BERWUJUD PADA PT PLN
(PERSERO) UP3 BINJAI
BERDASARKAN
PSAK NO.16**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

RINI MAWADDAH HIDAYATI NST
1615100121

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Aset Tetap Berwujud Pada PT.PLN (Persero) UP3 Binjai Berdasarkan PSAK No.16”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi atas aset tetap berwujud pada laporan keuangan triwulan di PT.PLN (Persero) UP3 Binjai dan membuktikan apakah perlakuan akuntansi pada aset tetap berwujud di PT.PLN (Persero) UP3 Binjai sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16. Penelitian perlakuan akuntansi terhadap aset tetap berwujud ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi serta data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa perlakuan akuntansi terhadap aset tetap berwujud pada perusahaan tersebut sudah baik dan dapat dipertanggungjawabkan, dimana perlakuan akuntansinya sudah sesuai dengan fase-fase perlakuan akuntansi yang baik menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Ketiga fase tersebut sudah baik, namun masih terdapat kekurangan pada bagian pelaporan aset tetap yang tidak dilaporkan secara terinci di laporan posisi keuangan (*Neraca*). Sebaiknya pelaporan aset tetap pada perusahaan dilaporkan secara terperinci di laporan posisi keuangan (*Neraca*) agar dapat terhindar dari resiko-resiko yang dapat merugikan perusahaan.

Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi, Aset Tetap Berwujud, Analisis

ABSTRACT

This study is entitled “Analysis of Accounting Treatment for Tangible Fixed Assets in PT.PLN (Persero) UP3 Binjai Based on PSAK NO.16”. This study aims to analyze how the accounting treatment of tangible fixed assets in the quarterly financial statements at PT.PLN (Persero) UP3 Binjai and prove whether the accounting treatment of tangible fixed assets at PT.PLN (Persero) UP3 Binjai is in accordance with Statement of Financial Accounting Standards Number 16. This accounting treatment study of tangible fixed assets is carried out using descriptive qualitative research methods. Data collection techniques in this study in the form of observation, interviews, and documentation as well as the data used are primary data and secondary data. The results of research that have been done that the accounting treatment of tangible fixed assets in the company are good and can be accounted for, where the accounting treatment is in accordance with the phases of good accounting treatment according to the Statement of Financial Accounting Standards. The three phases are already good, but there are still deficiencies in the reporting section of fixed assets that are not reported in detail in the statement of financial position (*balance sheet*). We recommend reporting fixed assets to the company reported in detail in the statement of financial position (*balance sheet*) in order to avoid the risks that can harm the company.

Keyword : Accounting Treatment, Tangible Assets, Analysis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	5
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Batasan Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Tujuan Penelitian	6
1.4.2 Manfaat Penelitian	6
1.5 Keaslian Penelitian	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)	9
2.1.2 Perlakuan Akuntansi	10
2.1.3 Aset Tetap	11

2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Pemikiran	28
BAB III : METODE PENELITIAN	31
3.1 Pendekatan Penelitian	31
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.2.1 Lokasi Penelitian	32
3.2.2 Waktu Penelitian	32
3.3 Jenis dan Sumber Data	32
3.3.1 Jenis Data	32
3.3.2 Sumber Data	33
3.4 Definisi Operasional Variabel	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Teknik Analisa Data	35
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Hasil Penelitian	37
4.1.1 Sejarah Perkembangan Perusahaan	37
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan	41
4.1.3 Uraian Struktur Organisasi Perusahaan	42
4.1.4 Pembahasan Kegiatan Perusahaan	44
4.1.5 Perlakuan Akuntansi Atas Aset Tetap Berwujud	62
4.2 Pembahasan	70
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	
BIODATA	

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Aset Tetap Berwujud Pada PT.PLN (Persero) UP3 Binjai Berdasarkan PSAK No.16” dengan tepat waktu. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi (Strata Satu / S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini bahwa penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi oleh penulis dengan adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Junawan, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Heriyati Chrisna, S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing I (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.

5. Ibu Rahima Br. Purba, S.E.,M.Si, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang juga sudah banyak membantu untuk perbaikan sistematika penulisan skripsi saya.
6. Bapak Nova Sagita selaku Kepala / Pimpinan pada PT.PLN (Persero) UP3 Binjai tempat saya melaksanakan penelitian skripsi.
7. Keluarga besar PT.PLN (Persero) UP3 Binjai yang telah memberi izin, pengarahan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya.
8. Kedua orang tua saya yang tercinta Bapak Ahmad Rizal Ansori Hidayah Nst, S.Pd dan Ibu Eni Kusri Koto, S.Ag yang telah memberikan do'a, semangat, dan segala yang terbaik bagi saya.
9. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi (HMA UNPAB) yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk saya.
10. Kepada sahabat-sahabat saya yang tercinta Sania Sabrina, Sherliani Eka Putri, Selli Putri Aprillia, Rizky Ulisani Sidabutar, Desy Risyah yang selalu memberi motivasi kepada saya .
11. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi khususnya Squad Para Pejuang SE.

Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan, semoga penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Medan, Agustus 2020

(Rini Mawaddah Hidayati Nst)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan yang didirikan tentunya memiliki tujuan yang sama, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Tujuan utama didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sehingga nantinya diharapkan hasil dari keuntungan itu dapat mempertahankan kelancaran hidup perusahaan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu agar pengelolaan kegiatan operasional perusahaan dalam membangun perusahaan bisa berjalan dengan baik dan lancar diperlukan beberapa faktor pendukung.

Salah satu faktor yang mendukung kegiatan operasional perusahaan yaitu aset tetap yang digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Keberadaan aset tetap merupakan bagian terpenting dari keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. Aset tetap sebagai penggerak perusahaan perlu diberlakukan secara wajar, dicatat dan dilaporkan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), agar tidak terjadi konflik antara pengguna laporan keuangan dan manajemen perusahaan. Maka dari itu dibutuhkanlah standar yang mengatur bagaimana seharusnya laporan keuangan itu disajikan agar dapat diperbandingkan. Karena perlakuan akuntansi aset tetap sangat besar pengaruhnya terhadap laporan keuangan perusahaan.

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode (PSAK No.16, 2018:16.2). Aset yang dimiliki perusahaan dapat dipilah ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan kriteria tertentu mulai dari

aset lancar, aset tetap berwujud, hingga aset tetap tidak berwujud. Di antara berbagai jenis aset tersebut, aset tetap perusahaan harus diberi perhatian khusus, karena aset tetap memiliki nilai yang relatif besar dan digunakan oleh perusahaan dalam jangka panjang. Agar dapat dikelompokkan sebagai aset tetap, aset harus memiliki kriteria tertentu, yaitu berwujud, umurnya lebih dari satu tahun, digunakan dalam operasi perusahaan, tidak diperjual belikan, material, dan dimiliki oleh perusahaan (Rudianto; 2017: 149).

Umumnya perusahaan memiliki aset tetap yang terdiri dari tanah, bangunan atau gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan. Semua itu harus dikelola sebaik mungkin mulai dari pengakuan, pengukuran, pelaporan, pengeluaran, penyusutan, dan penghentian. Setiap aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, dimana masing-masing cara tersebut akan mempengaruhi penentuan harga perolehan aset tetapnya. Cara perolehannya antara lain : pembelian tunai dan kredit, perolehan dengan sewa beli (*leasing*), ditukar dengan surat berharga, ditukar dengan aset tetap yang lain, dan diperoleh sebagai donasi (Rudianto, 2017:154).

Selain itu, aset tetap juga akan mengalami penyusutan setiap tahunnya, sehingga suatu perusahaan perlu melakukan penyusutan terhadap harga perolehannya. Sesuai dengan PSAK No.16 (2018:16.2) yang menyatakan bahwa penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan dari aset selama umur manfaatnya. Permasalahan akuntansi yang biasa terjadi terkait dengan aset tetap, yaitu : penentuan harga perolehan aset tetap, pencatatan pengeluaran setelah perolehan aset tetap, penyusutan aset tetap, pelepasan aset tetap, dan penyajian aset tetap.

PT. PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah lama berdiri dan merupakan satu – satunya perusahaan penyedia listrik yang melayani masyarakat di seluruh Indonesia. PT.PLN (Persero) telah bertekad untuk memberikan pelayanan jasa ketenagalistrikan yang terbaik dengan memenuhi standar ketenagalistrikan agar bisa diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya. BUMN merupakan suatu asosiasi yang diadakan oleh pemerintah, dimana asosiasi merupakan suatu wadah kerja sama untuk jangka waktu yang relatif lama dan berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki (Prasetya, 2011).

Seperti perusahaan lainnya, PT. PLN (Persero) juga perlu mengetahui bagaimana kondisi keuangan perusahaannya yang berguna untuk mengetahui sejauh mana perkembangan perusahaan. Kondisi keuangan tersebut dapat diketahui dari perlakuan atas laporan keuangannya. Analisis laporan keuangan sangat diperlukan oleh perusahaan, karena dengan menganalisis laporan keuangan kondisi perusahaan dapat diketahui apakah perusahaan tersebut mengalami kemajuan atau kemunduran dan hal itu dapat juga diketahui dengan melihat perlakuan akuntansi pada aset tetapnya. Aset tetap sangat berarti terhadap kelayakan laporan keuangan, kesalahan dalam menilai aset tetap dapat mengakibatkan kesalahan yang cukup material.

PT. PLN (Persero) UP3 Binjai merupakan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) area Binjai atau unit pelaksana di bawah unit induk distribusi untuk area Binjai. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang distribusi kelistrikan, tentunya perusahaan ini memiliki berbagai jenis aset tetap antara lain tanah dan hak atas tanah, bangunan dan kelengkapan halaman, instalasi dan

mesin, perlengkapan penyaluran tenaga listrik, jaringan distribusi, gardu distribusi, perlengkapan lain-lain distribusi, perlengkapan pengolahan data, perlengkapan telekomunikasi, perlengkapan umum, serta kendaraan bermotor dan alat-alat yang mobil.

PT.PLN (Persero) UP3 Binjai menggunakan sistem SAP (*System Application and Products in Data Processing*) untuk pengelolaan bisnisnya. Tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk mencapai kondisi ideal perusahaan. SAP (*System Application and Products in Data Processing*) merupakan software *Enterprise Resources Panning* (ERP), yaitu suatu tools IT dan manajemen untuk membantu perusahaan merencanakan dan melakukan kegiatan operasionalnya secara lebih efektif dan efisien. Secara umum SAP adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data yang digunakan perusahaan dalam rangka mengelola sumber daya yang dimilikinya. Jumlah pegawai di PT.PLN (Persero) UP3 Binjai saat ini ada 73 orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 59 orang dan wanita sebanyak 14 orang, semuanya telah ditempatkan di bidangnya masing-masing. Jumlah pegawai akan terus menerus berubah, karena disini ada sistem mutasi setiap tahunnya.

PT.PLN (Persero) UP3 Binjai tidak menggambarkan secara detail informasi mengenai jenis-jenis aset tetap perusahaan. Pengungkapan aset tetap PT.PLN (Persero) UP3 Binjai belum memadai karena belum semua diungkapkan yakni pelaporan aset tetap yang diungkapkan dalam neraca tidak terperinci secara terpisah, sebagian aset yang sudah tidak dicatat lagi keberadaannya karena umurnya yang pendek dan urusannya yang ribet namun fisik nya masih ada dan terkadang masih digunakan. Saat ini sebagian aset itu telah diperoleh dengan cara

sewa beli (*leasing*) yaitu untuk jenis perlengkapan umum dan kendaraan bermotor.

Melihat peranan tersebut maka aset tetap harus mendapat perhatian khusus dari manajemen perusahaan untuk melaporkan jenis-jenis aset tetap secara terpisah dalam neraca dan mengungkapkannya secara terperinci mengenai hal-hal tersebut, serta dibutuhkan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan aset tetap perusahaan. Sehingga nantinya perusahaan dapat menyajikan informasi yang akurat pada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Aset Tetap Berwujud Pada PT.PLN (Persero) UP3 Binjai Berdasarkan PSAK No.16**”.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis diatas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pengungkapan aset tetap yang tidak terperinci dalam laporan keuangan neraca triwulan PT.PLN (Persero) UP3 Binjai.
- b. Adanya aset tetap yang tidak dicatat lagi keberadaannya namun fisiknya masih ada.

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan penulis diatas, maka penelitian ini dibatasi ruang lingkupnya hanya pada perlakuan akuntansi atas aset tetap berwujud untuk jenis gardu distribusi saja.

Perlakuan akuntansi yang dimaksud terdiri dari pengakuan, pengukuran, pelaporan, pengeluaran, penyusutan dan penghentian. Penelitian ini tidak meluas serta menyimpang dari judul penelitian yaitu : “Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Aset Tetap Berwujud Pada PT.PLN (Persero) UP3 Binjai Berdasarkan PSAK No.16”.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlakuan akuntansi atas aset tetap berwujud di PT. PLN (Persero) UP3 Binjai ?
2. Apakah perlakuan akuntansi pada aset tetap berwujud di PT.PLN (Persero) UP3 Binjai sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi atas aset tetap berwujud pada laporan keuangan triwulan di PT.PLN (Persero) UP3 Binjai.
2. Untuk membuktikan apakah perlakuan akuntansi pada aset tetap berwujud di PT.PLN (Persero) UP3 Binjai sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan ilmu penulis mengenai perlakuan akuntansi pada aset tetap berwujud.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana perlakuan akuntansi pada aset tetap berwujud di PT.PLN (Persero) UP3 Binjai.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan / referensi tambahan untuk peneliti selanjutnya di waktu yang akan datang.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian Novi Yantika (2017) Program Studi Akuntansi STIE Widya Dharma Pontianak yang berjudul **“Penerapan Konvergensi IFRS Pada PSAK No.16 Atas Aset Tetap Berwujud Pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk Dan Entitas Anak”**. Sedangkan Penelitian ini berjudul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Aset Tetap Berwujud Pada PT.PLN (Persero) UP3 Binjai Berdasarkan PSAK No.16”**.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada :

- 1. Variabel Penelitian :** penelitian terdahulu menggunakan 1 (satu) variabel yang diteliti yaitu penerapan konvergensi IFRS, sedangkan penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel yang diteliti yaitu perlakuan akuntansi terhadap aset tetap berwujud.
- 2. Waktu Penelitian :** penelitian terdahulu dilakukan tahun 2017 dengan PSAK No.16 (revisi 2011), sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2020 dengan PSAK No.16 (2018).
- 3. Lokasi Penelitian :** lokasi penelitian terdahulu di **PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk Dan Entitas Anak** sedangkan penelitian ini dilakukan di **PT.PLN (Persero) UP3 Binjai**.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu kerangka prosedur pentunjuk untuk membuat laporan keuangan akuntansi yang berisikan tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan. PSAK menetapkan dasar-dasar penyajian laporan keuangan yang memiliki tujuan umum untuk bisa dibandingkan dengan baik pada laporan keuangan yang sebelumnya atau pada laporan keuangan lainnya. Informasi tentang entitas yang disajikan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) aset, ekuitas, liabilitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik, serta arus kas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah pedoman bagi para akuntan di Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ini disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang didasarkan pada kondisi yang sedang berjalan dan sudah disepakati dan sudah disahkan oleh institut atau lembaga resmi di Indonesia. Standar akuntansi keuangan di Indonesia telah berkembang menjadi 4 pilar yang disusun dengan mengikuti perkembangan di dunia usaha. Adapun 4 pilar dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yaitu :

- a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – *International Financial Report Standard* (PSAK - IFRS)
- b. Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntansi Publik (SAK - ETAP)
- c. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan - Syariah (PSAK - Syariah)
- d. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

2.1.2 Perlakuan Akuntansi

Akuntansi secara umum adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Rudianto (2012:4) menyatakan bahwa akuntansi diartikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan, dan komunikasi terhadap transaksi ekonomi dari suatu entitas (Wibowo dan Abubakar ; 2018:1). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlakuan merupakan suatu perbuatan yang dikenakan terhadap sesuatu atau orang.

Berdasarkan kedua pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi adalah suatu perbuatan / tindakan yang dilakukan terhadap sebuah kejadian yang berhubungan dengan keuangan. Secara umum perlakuan akuntansi atas aset tetap dibagi kedalam beberapa fase :

- a. Fase Perolehan Aset Tetap

Fase perolehan aset tetap adalah fase dimana aset tetap diperoleh hingga tetap tetap tersebut dapat digunakan atau berfungsi. Permasalahan yang timbul pada fase ini meliputi : penilaian (pengukuran), pengakuan (pencatatan), dan pelaporan atas perolehan aset tetap.

b. Fase Penggunaan Aset Tetap

Fase penggunaan aset tetap adalah fase dimana saat aset tetap sudah dan sedang dioperasikan. Permasalahan yang timbul pada fase ini meliputi : pengeluaran, penyusutan dan amortisasi, serta penilaian kembali.

c. Fase Penarikan Aset Tetap

Fase penarikan aset tetap adalah fase dimana saat aset tetap sudah tidak memiliki manfaat ekonomis lagi dimasa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

2.1.3 Aset Tetap

1. Pengertian Aset Tetap

Aset tetap secara umum adalah aset yang digunakan untuk mendukung kegiatan utama perusahaan. Dalam akuntansi aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Berdasarkan PSAK No.16 (2018:16.2) Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Aset tetap merupakan semua benda yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki nilai guna ekonomis serta mempunyai umur (masa) manfaat lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun) dan diakui serta diukur berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum (Kusnadi ; 2012:142). Martani (2012:271) menyatakan bahwa aset tetap adalah aset yang mempunyai bentuk fisik (seperti tanah, bangunan), berbeda dengan paten atau merek dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik. Reeve (2012:2) juga mengemukakan bahwa aset tetap (*fixed asset*) merupakan aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang. Aset ini merupakan aset berwujud karena mempunyai bentuk fisik. Aset ini dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan tidak dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi normal.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aset tetap itu adalah aset yang memiliki beberapa karakteristik yaitu :

- a. Mempunyai bentuk fisik
- b. Dimiliki untuk digunakan dalam operasional normal perusahaan dan tidak untuk dijual
- c. Memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun

2. Jenis - Jenis Aset Tetap

Berbagai benda dapat dikategorikan sebagai aset tetap selama memenuhi kriteria sebagai aset tetap. Akan tetapi, karena setiap perusahaan memiliki ciri khusus yang berbeda satu dengan yang lainnya dimulai dari bidang usaha hingga jumlah aset yang dimiliki maka terdapat begitu banyak jenis aset tetap. Secara

umum, terdapat berbagai benda yang dapat dikelompokkan sebagai aset tetap bagi sebuah perusahaan, yaitu :

- 1) Mebel
- 2) Peralatan Kantor
- 3) Kendaraan
- 4) Mesin
- 5) Bangunan (kantor, ruko, gudang, dan sebagainya)
- 6) Tanah

Firdaus A. Dunia (2014:211-212) mengemukakan beberapa jenis aset tetap yang terdiri dari :

- 1) Lahan : bidang tanah terhampar baik yang merupakan tempat bangunan maupun yang masih kosong.
- 2) Gedung : bangunan yang terdiri di atas lahan baik yang berdiri di atas tanah maupun diatas air.
- 3) Kendaraan : sarana angkutan yang dimiliki perusahaan untuk mendukung kegiatan operasionalnya.
- 4) Inventaris : perlengkapan yang melengkapi isi kantor. Termasuk perlengkapan pabrik, kantor, ataupun alat-alat besar yang digunakan dalam perusahaan.

3. Pengelompokan Aset Tetap

Untuk tujuan akuntansi, berbagai jenis aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu :

- 1) Aset tetap yang umumnya tidak terbatas, seperti tanah tempat kantor atau bangunan pabrik berdiri, lahan pertanian, lahan perkebunan, dan lahan

peternakan. Aset tetap jenis ini dapat digunakan secara terus menerus selama perusahaan menghendaknya tanpa harus memperbaiki atau menggantinya.

- 2) Aset tetap yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya dapat diganti dengan aset lain yang sejenis, seperti bangunan, mesin, kendaraan, computer, mebel, dan lainnya. Aset tetap dalam kelompok kedua ini memiliki umur ekonomis maupun umur teknis yang terbatas. Karena itu, jika secara ekonomis sudah tidak menguntungkan (beban yang dikeluarkan lebih besar dari manfaatnya), maka aset seperti ini harus diganti dengan aset lain.
- 3) Aset tetap yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya tidak dapat diganti dengan yang sejenis, seperti tanah pertambangan dan hutan. Kelompok aset tetap yang ketiga ini hanya dapat digunakan sekali dan tidak dapat diperbarui karena kandungan atau isi dari aset itulah yang dibutuhkan, bukan wadah luarnya.

4. Cara-Cara Memperoleh Aset Tetap

1. Diperoleh dengan Pembelian Tunai dan Kredit

Pembelian aset tetap oleh sebuah perusahaan dapat dilakukan baik secara tunai maupun secara kredit. Pembelian tersebut dikategorikan sebagai pembelian tunai jika antara pihak pembeli dan penjual aset tetap menyepakati pembayarannya dalam satu kali transaksi, yang disertai dengan penyerahan aset tetap tersebut beserta berbagai surat-surat kepemilikan yang terkait.

Pembelian akan dikategorikan sebagai pembelian kredit jika antara pihak pembeli dan penjual aset tetap menyepakati pembayarannya dilakukan dalam beberapa kali transaksi pembayaran, yang disertai dengan penyerahan aset tetap

tersebut beserta berbagai surat-surat kepemilikan yang terkait. Misalnya pembayaran dilakukan dalam tiga kali pembayaran selama kurun waktu enam bulan, sementara kekurangan pembayarannya akan dikenakan bunga. Beban bunga ini tidak dimasukkan sebagai bagian dari harga perolehan aset tetap, tetapi sebagai bagian dari beban operasi periode bersangkutan. Aset tetap yang diperoleh melalui pembelian tunai maupun kredit akan dicatat di pembukuan sebesar jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut, yang mencakup harga faktur aset tetap, bea balik nama, beban angkut, beban pemasangan, dan lain-lain.

2. Ditukar dengan Surat Berharga

Aset tetap yang ditukar dengan surat berharga, baik saham maupun obligasi perusahaan tertentu, dicatat dalam pembukuan sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Apabila harga pasar saham atau obligasi itu tidak diketahui, maka harga perolehan aset tetap ditentukan sebesar harga pasar aset tersebut. Apabila harga surat berharga dan aset tetap yang ditukar tidak diketahui, maka dalam keadaan seperti ini nilai pertukaran ditentukan oleh keputusan pimpinan perusahaan. Nilai pertukaran ini dipakai sebagai dasar pencatatan harga perolehan aset tetap dan nilai-nilai surat berharga yang dikeluarkan.

3. Ditukar dengan Aset Tetap yang Tidak Sejenis

Pertukaran aset yang tidak sejenis artinya aset tersebut memiliki fungsi yang berbeda selain sekuritas. Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset tetap yang tidak sejenis, maka aset tetap dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diperoleh atau aset yang diserahkan tergantung dari mana yang lebih

berdasarkan bukti atau data yang tersedia. Perbedaan nilai buku aset yang diserahkan dengan nilai wajar yang digunakan pada tanggal transaksi harus dicatat sebagai laba atau rugi pertukaran.

4. Ditukar dengan Aset Tetap yang Sejenis

Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset tetap yang sejenis, maka perlakuan akuntansi untuk aset tetap yang diperoleh melalui transaksi pertukaran aset non-moneter. Dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diperoleh atau aset yang diserahkan yang lebih layak berdasarkan bukti/data yang tersedia. Perbedaan antara nilai buku aset yang diserahkan dengan nilai wajar yang diterima dalam hal terjadi kerugian maka akan langsung diakui, sedangkan bila terjadi laba maka harus ditangguhkan.

5. Diperoleh dengan Pembuatan Sendiri

Melalui pertimbangan tertentu perusahaan seringkali membuat sendiri aset tetap yang diperlukan seperti alat-alat perusahaan, gedung dan perabot. Jika aset tetap diperoleh dengan pembuatan sendiri, maka harga perolehan aset tetap yang dibuat atau dibangun sendiri meliputi semua biaya yang terjadi berkenaan dengan pembuatan aset tersebut hingga siap untuk digunakan. Adapun biaya-biaya yang timbul dan menjadi komponen harga perolehan adalah : biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya overhead bisa dibebankan berdasarkan tariff atau berdasarkan kenaikan atau tambahan biaya overhead akibat pembuatan aset tersebut.

6. Diperoleh sebagai Sumbangan / Hibah / Hadiah

Jika aset tetap yang diperoleh sebagai sumbangan/hibah/hadiah, maka aset tersebut akan dicatat dan diakui sebesar harga pasarnya. Akan tetapi, bila untuk

memproleh aset ini perlu dilakukan pengorbanan sehingga perusahaan hanya akan menerima nilai bersihnya.

5. Pengakuan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap diakui sebagai jika dan hanya jika :

- 1) Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut.
- 2) Biaya perolehannya dapat diukur secara andal.

Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan ini terhadap seluruh biaya perolehan aset tetap pada saat terjadinya. Biaya tersebut termasuk biaya awal untuk memperoleh atau mengkonstruksi aset tetap dan biaya selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti bagian, atau memperbaikinya.

a. Biaya Perolehan Awal

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan pada aset ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK. Aset tetap dapat diperoleh untuk alasan keamanan atau lingkungan. Perolehan aset tetap tersebut, meskipun tidak secara langsung meningkatkan manfaat ekonomik masa depan dari aset tetap tertentu yang ada, mungkin diperlukan bagi entitas untuk memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset lain. Aset tetap tersebut memenuhi syarat pengakuan aset, karena aset tersebut memungkinkan entitas memperoleh manfaat ekonomik masa depan yang lebih besar dari aset terkait dibandingkan dengan manfaat ekonomik yang dihasilkan seandainya aset tersebut tidak diperoleh (PSAK No.16, 2018:16.3).

b. Biaya Selanjutnya

Entitas tidak mengakui biaya perawatan sehari-hari aset tetap sebagai bagian dari aset tetap tersebut. Sebaliknya, biaya tersebut diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari terutama terdiri dari biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai termasuk suku cadang kecil. Tujuan pengeluaran ini sering dideskripsikan sebagai "perbaikan dan pemeliharaan" aset tetap.

Bagian tertentu aset tetap dapat mensyaratkan penggantian secara periodik. Entitas dapat melakukan penggantian yang tidak terlalu sering atas aset tetap yang diperoleh, seperti mengganti dinding interior bangunan, atau melakukan penggantian yang tidak berulang. Sesuai dengan prinsip pengakuan di paragraf 07, entitas mengakui biaya penggantian komponen aset tetap dalam jumlah tercatat aset tetap ketika biaya tersebut terjadi jika pengeluaran tersebut memenuhi kriteria pengakuan.

6. Pengukuran Aset Tetap

1. Pengukuran Saat Pengakuan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 menyebutkan bahwa aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap adalah setara harga tunai pada tanggal pengakuan. Jika pembayaran yang ditangguhkan melampaui jangka waktu kredit secara normal, maka perbedaan antara harga tunai dan total pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit kecuali beban bunga tersebut dikapitalisasikan. Biaya perolehan aset tetap meliputi :

- a. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain.
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen.
- c. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

2. Pengukuran Setelah Pengakuan

PSAK No.16 menyebutkan ada dua model pengukuran aset tetap setelah pengakuan, yaitu :

a. Model Biaya

Setelah pengakuan sebagai aset, pada model biaya aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

b. Model Revaluasi

Setelah pengakuan sebagai aset, pada model revaluasi aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dan dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelas yang sama akan direvaluasi. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

Jika jumlah tercatat turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.

Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran aset tetap, maka perubahan tersebut berlaku secara prospektif.

7. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan dari aset selama umur manfaatnya (PSAK No.16, 2018:16.2). Menurut Kartikahadi (2012:344) penyusutan adalah “proses pengalokasian biaya perolehan suatu aset tetap sedemikian sehingga jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset tetap dapat dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya. Sedangkan Rudianto (2012:260) menyatakan bahwa “penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan aset tetap menjadi beban ke dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aset tetap tersebut.

Secara berkala, semua aset tetap kecuali tanah akan mengalami penyusutan atau penurunan kemampuan dalam menyediakan manfaat. Dengan adanya penyusutan, maka nilai dari aset tetap tercatat tidak lagi dapat mewakili nilai dari manfaat yang dimiliki aset tetap tersebut. Agar nilai aset tetap tercatat dapat memiliki nilai dari manfaat yang dimilikinya, maka perlu dilakukan pengalokasian manfaat atas aset tetap ke dalam akumulasi biaya secara sistematis berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap. Pengalokasian manfaat atas aset tetap harus dilakukan secara sistematis.

Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikansi terhadap total biaya perolehan seluruh aset tetap disusutkan secara terpisah. Beban penyusutan untuk setiap periode diakui dalam laba rugi, kecuali jika beban tersebut termasuk dalam jumlah tercatat aset lain. Rudianto (2012:260) menjelaskan bahwa ada tiga faktor untuk menentukan biaya penyusutan setiap periode, yaitu :

1. Harga perolehan (biaya perolehan), yaitu keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset tetap sampai siap digunakan oleh perusahaan.
2. Nilai sisa (residu), yaitu taksiran harga jual aset tetap pada akhir masa manfaatnya, setiap perusahaan akan memiliki taksiran yang berbeda satu dengan lainnya atas suatu jenis aset tetap yang sama.
3. Taksiran umur kegunaan, yaitu taksiran masa manfaat dari aset tetap, masa manfaat adalah taksiran umur ekonomis dari aset tetap, bukan umur teknis. Taksiran masa manfaat dapat dinyatakan dalam satuan periode waktu, satuan hasil produksi, atau satuan jam kerja.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan pada aset ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK. Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, jika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diperkirakan pada akhir umur manfaatnya (PSAK No.16, 2018:16.2).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa masa manfaat merupakan suatu periode di mana aset diharapkan akan digunakan untuk entitas atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset tersebut oleh entitas. Berdasarkan PSAK No.16 (2018:16.2) umur manfaat adalah :

- a. Periode diperkirakan dapat digunakan oleh entitas.
- b. Jumlah produksi atau unit serupa dari aset yang diperkirakan akan diperoleh dari aset entitas.

Jumlah tersusutkan dari suatu aset dialokasikan secara sistematis sepanjang umur manfaat. Berdasarkan PSAK No.16 (2018:16.2) jumlah tersusutkan adalah biaya perolehan aset, atau jumlah lain yang merupakan pengganti biaya perolehan, dikurangi nilai residunya. Nilai residu dan umur manfaat dari suatu aset ditelaah sekurang-kurangnya setiap akhir tahun buku dan jika hasil kajian berbeda dengan estimasi sebelumnya, maka perbedaan tersebut dicatat sebagai estimasi akuntansi.

Untuk menghitung penyusutan aset tetap terdapat beberapa metode yang harus digunakan sesuai dengan karakteristik manfaat ekonomik masa depan aset yang diharapkan oleh entitas. Metode penyusutan yang diterapkan untuk suatu aset ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun buku dan, jika terjadi perubahan yang signifikan dalam pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomik masa depan aset tersebut, maka metode penyusutan diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Berbagai metode yang dapat digunakan, yaitu :

a. Metode Garis Lurus

Metode ini menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Rumus untuk menghitung penyusutan dengan metode ini, yaitu :

$$\text{Beban Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Umur Manfaat}}$$

b. Metode Saldo Menurun

Metode ini menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Rumus untuk menghitung penyusutan metode ini, yaitu :

$$\text{Beban Penyusutan} = \text{Tarif Penyusutan} \times \text{Nilai Tercatat}$$

c. Metode Unit Produksi

Metode ini menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diperkirakan dari aset. Rumus untuk menghitung penyusutan dengan metode ini, yaitu :

$$\text{Beban Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Taksiran Hasil Produksi (Unit)}}$$

8. Penghentian Aset Tetap

Jumlah tercatat aset tetap yang dihentikan jika, :

1. Pada saat pelepasan, atau
2. Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan ke dalam laba rugi ketika aset tetap tersebut telah dihentikan pengakuannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya.

9. Pengungkapan Aset Tetap

PSAK No.16 (2018:16.12) menyatakan bahwa laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelas aset tetap yaitu, :

- 1) Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto.
- 2) Metode penyusutan yang digunakan.
- 3) Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode.
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - a. Penambahan
 - b. Aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual
 - c. Perolehan melalui kombinasi bisnis
 - d. Peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi
 - e. Rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi

- f. Pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi.
- g. Penyusutan
- h. Selisih kurs neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang pelaporan dari entitas pelapor.
- i. Perubahan lain

Laporan keuangan juga mengungkapkan :

- a. Keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijamin untuk liabilitas.
- b. Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam konstruksi.
- c. Jumlah komitmen kontraktual untuk memperoleh aset tetap
- d. Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan yang termasuk dalam laba rugi, jika tidak diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai referensi / acuan dalam penyusunan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian ini antara lain telah diringkas pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama / Tahun	Judul	Model Analisis	Hasil Penelitian
1.	Deisy Seleste Ruata, Jantje J Tinangon, Lidia M Mawikere / 2018	Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No. 16 Pada PT Bank Maluku Malut Cabang Tobelo	Analisis deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Maluku Malut Cabang Tobelo dalam menghitung penyusutan menggunakan metode garis lurus perlakuan akuntansi aset tetap dalam hal distribusi, pengukuran, penilaian, dan penyajian tidak ada masalah sama sekali yang diterapkan oleh PT Bank Maluku Malut Cabang Tobelo sesuai dengan standar pernyataan akuntansi keuangan No. 16.
2.	Gerry Hasransyah, Set Asmapane, Ferry Diyanti / 2017	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan	Analisis deskriptif kualitatif	Hasil analisis yang diperoleh adalah perlakuan akuntansi aset tetap pada PT. ASA Sumber Rezeki di Tenggarong telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Tentang Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Meskipun masih terdapat hal yang perlu disesuaikan dalam pengakuan, pencatatan, dan perhitungan aset tetap. Nilai perolehan aset tetap pada tahun 2015 menurut PT. ASA Sumber Rezeki di Tenggarong adalah sebesar Rp 847.533.076 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp 4.940.216.944, sedangkan menurut Standar Akuntansi

				Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) nilai perolehan memiliki jumlah yang sama yaitu sebesar Rp 847.533.076, dengan akumulasi penyusutan sebesar 4.875.560.428 sehingga terdapat selisih nilai buku sebesar Rp. 53.218.912 yang menyebabkan perbedaan nilai aset tetap dan nilai ekuitas perusahaan ditahun 2015.
3.	Heri Wahyudi / 2014	Analisis Perlakuan Aktiva Tetap Pada PT. Bhanda Ghara Reksa Medan	Analisis deskriptif kualitatif	Hasil analisis yang diperoleh adalah aktiva tetap yang diberlakukan PT. Bhanda Ghara Reksa Medan telah sesuai dengan struktur akuntansi umum, penyusunan aktiva tetap sewa guna usaha selama 1 priode akuntansi dengan pembentukan penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan.
4.	Enti Megawati Suhadak Moch. Dzulkirom AR / 2014	Perlakuan Akuntansi Atas Aktiva Tetap Berwujud Dan Penyajiannya Pada Laporan Keuangan (Studi Pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Pabrik Gula Meritjan Kediri Periode 2012)	Analisis deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan penyusutan dan biaya-biaya perolehan aktiva tetap yang sesuai dengan International Accounting Standard dapat mempengaruhi laba rugi perusahaan.

5.	Fitrah Mustamin / 2013	Analisis Pengakuan, Pengukuran Dan Pelaporan Aktiva Tetap Berdasarkan PSAK No.16	Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pengakuan, pengukuran dan pelaporan aktiva tetap pada PT Hasjrat Abadi secara umum telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 16, kecuali untuk pelaporan aktiva tetap mengenai keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik dan aktiva tetap yang dijamin untuk liabilities, jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aktiva tetap, serta jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aktiva tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan yang dimasukkan dalam laba rugi, jika tidak diungkapkan secara terpisah pada pendapatan komprehensif lain, tidak dijelaskan dalam pelaporan aktiva tetap.
----	------------------------	--	--	---

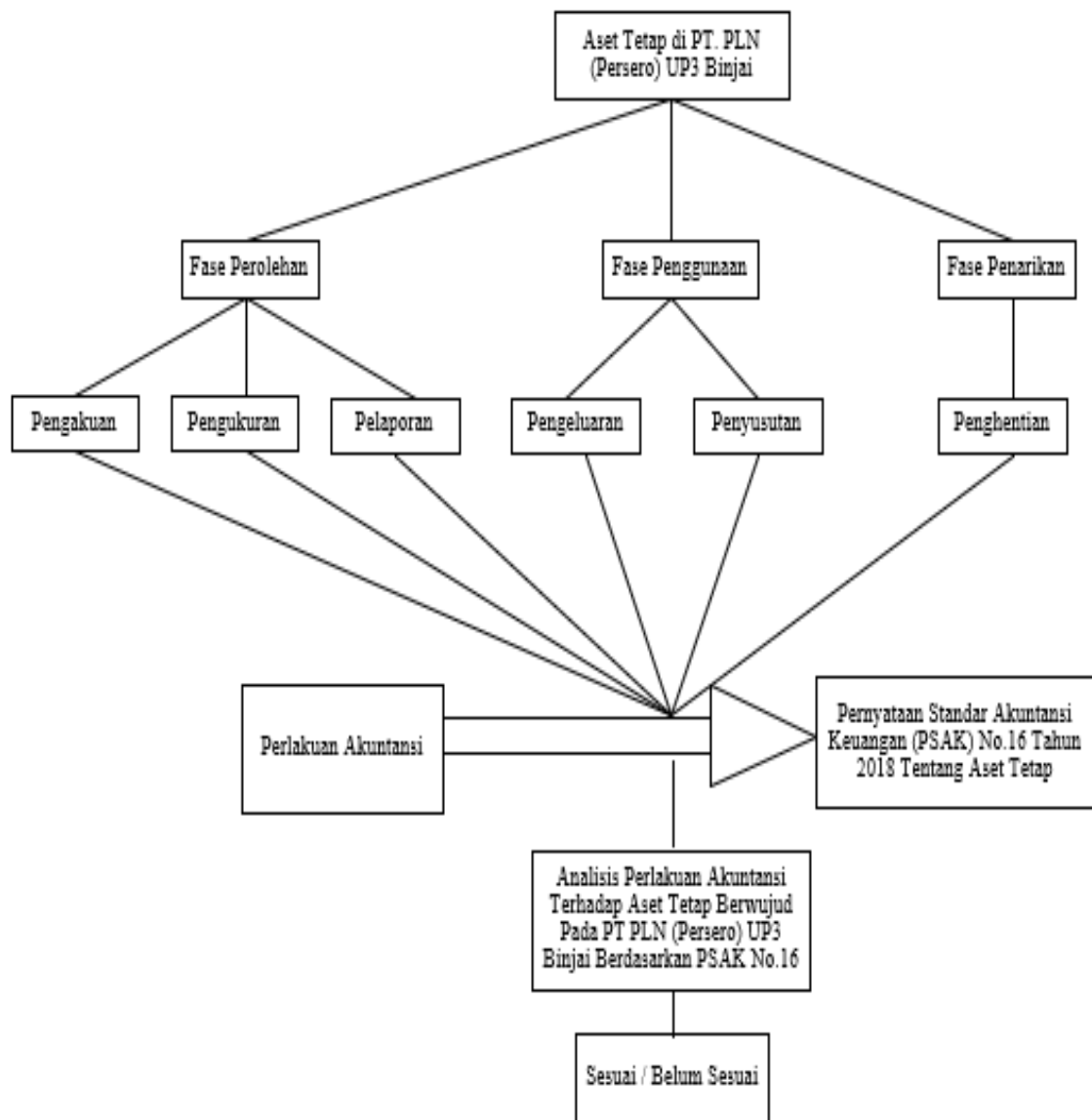
2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan (Sugiyono, 2017:60). Sekaran (2017) menyatakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Maka dapat disimpulkan bahwa kerangka berfikir adalah penjelasan sementara secara konseptual tentang keterkaitan hubungan pada

setiap objek permasalahan berdasarkan teori. PT.PLN (Persero) merupakan salah satu perusahaan yang dalam keseluruhan prosesnya harus sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Penelitian ini akan dilaksanakan pada PT.PLN (Persero) UP3 Binjai yang dimana PT.PLN (Persero) UP3 Binjai memiliki perlakuan akuntansi yang mengacu pada perolehan aset tetap, penggunaan aset tetap, dan penarikan aset tetap.

Kegiatan yang terdapat didalam fase perolehan aset tetap adalah pengakuan yang bertujuan untuk pencatatan suatu kejadian atau peristiwa menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan dari entitas pelaporan yang bersangkutan, pengukuran yang bertujuan untuk proses penempatan nilai uang demi mengakui dan memasukkan setiap pos pada laporan keuangan, serta pelaporan yang bertujuan untuk proses penjelasan secara naratif atau rincian menyangkut angka-angka yang tertera dalam laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas.

Kegiatan yang terdapat didalam fase penggunaan aset tetap adalah pengeluaran yang bertujuan untuk pembayaran yang dilakukan pada kewajiban di masa yang akan datang dalam rangka memperoleh keuntungan dan penyusutan yang bertujuan untuk mengalokasikan sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Kegiatan yang terdapat didalam fase penarikan aset tetap adalah penghentian aset tetap yang bertujuan untuk pelepasan atas aset tetap yang sudah tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hidayat (2010) berpendapat bahwa penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu. Penelitian deskriptif sebagai penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada suatu variabel / lebih tanpa membuat perbandingan / menghubungkan dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2015:53). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuannya untuk menjelaskan (mendeskripsikan) suatu peristiwa, keadaan, objek, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel- variabel yang bisa dijelaskan baik menggunakan angka-angka maupun kata-kata.

Penelitian kualitatif menurut Lexy J (2011) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya. Dengan demikian penelitian akan bertujuan untuk menggambarkan suatu masalah atau keadaan perusahaan berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya terjadi. Tohirin (2013:2) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya membangun pandangan orang yang diteliti secara rinci serta dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistic (menyeluruh dan mendalam) serta rumit.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT.PLN (Persero) UP3 Binjai yang beralamat di Jl. Tengku Amir Hamzah No.37, Pahlawan, Binjai Utara, Kota Binjai.

3.2.2 Waktu Penelitian

Proses penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Oktober 2019 sampai dengan selesai, dengan format sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Kegiatan	2019-2020																				
		Okt			Nov-Feb			Mar			April			Mei-Juli			Agustus					
1	Pengajuan Judul																					
2	Kunjungan ke Perusahaan																					
3	Pembuatan Proposal																					
4	Seminar Proposal																					
5	Riset																					
6	Penyusunan Data																					
7	Analisis Data																					
8	Bimbingan Skripsi/Laporan																					
9	Sidang Meja Hijau																					

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berdasarkan pada asumsi opini dan potensi yang bersifat deskriptif atau data yang berwujud dalam pernyataan-pernyataan verbal.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh (Zuldafrial, 2012:46). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono ; 2012:225). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer melalui wawancara dan observasi berupa tanya jawab secara langsung kepada pihak yang berkompeten dalam perlakuan akuntansi pada aset tetap berwujud di PT.PLN (Persero) UP3 Binjai.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015:137). Data sekunder dapat berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data sekunder melalui data yang dikumpulkan oleh penulis dari dokumen-dokumen yang ada pada PT.PLN (Persero) UP3 Binjai.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional dilapangan. Definisi operasional sebaiknya berasal dari konsep teori dan definisi atau gabungan keduanya yang ada dilapangan.

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Definisi Operasional Variabel
Perlakuan Akuntansi Terhadap Aset Tetap Berwujud	a. Pengakuan b. Pengukuran c. Pelaporan d. Pengeluaran e. Penyusutan f. Penghentian	Sebuah proses untuk penetapan pencatatan suatu kejadian, penempatan nilai uang demi mengakui dan memasukkan setiap pos pada laporan keuangan, penjelasan secara rinci menyangkut angka-angka pada laporan keuangan, pembayaran yang wajib dilakukan dimasa yang akan datang untuk memperoleh keuntungan, mengukur jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya, serta sebagai pelepasan atas aset tetap yang sudah tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Riyanto (2010:96) menyatakan bahwa observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Supomo (2014), mengartikan observasi sebagai suatu proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) dan kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu. Maka dari itu, observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan para pegawai yang berwenang dilingkungan perusahaan untuk mengumpulkan data mengenai objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2012), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit / kecil.

3. Dokumentasi

Riyanto (2012:103) menyatakan bahwa dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Yusuf (2014) berpendapat bahwa dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumentasi merupakan teknik penelitian dimana peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan sehubungan dengan penelitian berupa dokumen-dokumen perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dokumen adalah segala benda yang berbentuk barang, gambar, ataupun tulisan sebagai bukti dan dapat memberikan keterangan yang penting dan absah. Pada penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mengambil data-data akuntansi yang berkaitan dengan transaksi bisnis atas aset tetap.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah dengan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menstabilisasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan

perhitungan untuk rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2010 : 428).

Umi Narimawati (2010:41) menyatakan bahwa metode analisis merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diproses dari hasil observasi lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Metode analisis yang dipakai pada penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan perusahaan berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya terjadi di suatu perusahaan. Setelah semua data yang diperoleh terkumpul, maka akan dilakukan analisis untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi aset tetap berwujud yang diterapkan perusahaan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau tidak.

Adapun model yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data yang diambil adalah laporan keuangan triwulan tahun 2018.
2. Dokumen yang diperlukan adalah Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi, serta daftar rincian penyusutan aset tetap.
3. Kebijakan-kebijakan akuntansi perusahaan mengenai perlakuan akuntansi atas aset tetap berwujud.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Perkembangan Perusahaan

Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau yang biasa disebut dengan PT. PLN (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Ketenagalistrikan di Indonesia sudah dimulai pada akhir abad ke-19 tepatnya pada tahun 1883 di daerah Batavia (Jakarta), yakni berawal dari perusahaan swasta Belanda yang dipimpin oleh N.V NIGEM / OGEM yang mendirikan sebuah pembangkit tenaga listrik untuk keperluan pribadi. Namun ketika pada masa penjajahan Jepang, pengelolaan pembangkit tenaga listrik tersebut diambil alih oleh pemerintah Jepang tanpa adanya penambahan mesin dan perluasan jaringan.

Perang Dunia II pada Agustus 1945, membuat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh para pemuda dan para buruh listrik melalui delegasi Buruh / Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pemimpin KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, diumumkanlah Kesatuan Aksi Karyawan Perusahaan Listrik di seluruh tanah air yang berguna untuk mengambil alih pengelolaan pembangkit tenaga listrik bekas milik perusahaan swasta Belanda dari tangan Jepang tersebut. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas dibawah

Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pemimpin Umum – Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak dibidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, kedua perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas sama-sama diresmikan. Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.

Perusahaan Listrik Negara Distribusi Cabang Sumatera Utara (Sumatera Timur dan Tapanuli) di Medan didirikan pada tahun 1955 yang awalnya dipimpin oleh R.Sukarno kemudian pada tahun 1959 kemudian dipimpin oleh Ahmad Syaifullah. Setelah BPU PLN berdiri dengan SK Menteri PUT No. 16//1/20 Mei 1961, maka organisasi kelistrikan diubah dari Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat dan Riau menjadi PLN Eksploitasi I. Tahun 1965, BPU PLN dibubarkan dengan Peraturan Menteri PUT No. 9/PRT/64 dan dengan Peraturan Menteri No.

1/PRT/65 yaitu ditetapkannya pembagian daerah kerja PLN menjadi 15 Kesatuan Daerah Ekplotasi I. Sumatera Utara tetap menjadi Ekplotasi I, maka dengan Keputusan Direksi PLN No.Kpts009/DIRPLN/66 tanggal 14 April 1966, PLN Ekplotasi I dibagi menjadi 4 cabang yaitu :

- a. Cabang Medan
- b. Cabang Binjai
- c. Cabang Sibolga
- d. Cabang Pematang Siantar

Peraturan Perundang-undangan (PP) No. 18 tahun 1972 mempertegas kedudukan PLN sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dengan hak wewenang dan tanggung jawab untuk membangkitkan, menyalurkan, dan mendistribusikan tenaga listrik keseluruh Wilayah Republik Indonesia. Kemudian menyusul Peraturan Menteri Perusahaan Umum Tenaga Listrik (PUTL) No.013/PRT/75 yang merubah PLN Eksploitasi menjadi PLN Wilayah. PLN Eksploitasi II menjadi PLN Wilayah II Sumatera Utara, dengan keluarnya PP No. 231/1994 tanggal 16 Juni 1994 maka ditetapkanlah status PLN sebagai Persero. Adapun yang melatarbelakangi perubahan status tersebut adalah untuk mengantisipasi kebutuhan listrik yang terus menerus meningkat.

Berdasarkan syarat keputusan Nomor 0787.K/023.DIR/1996 tanggal 9 Agustus 1996 dibentuk organisasi baru dibidang jasa pelayanan kelistrikan yaitu PT PLN (Persero) Pembangkit dan Penyaluran Sumatera Bagian Utara. Dengan pembentukan organisasi baru PLN Pembangkit dan Penyaluran Sumatera Bagian Utara yang terpisah dari PLN Wilayah II, maka fungsi-fungsi Pembangkit dan Penyaluran yang sebelumnya dikelola PLN Wilayah II berpindah tanggungjawab

pengelolaannya ke PLN Pembangkit dan Penyaluran Sumbagut. Sementara itu PLN Wilayah II berkonsentrasi pada distribusi dan penjualan tenaga listrik.

Dalam pelayanan pendistribusian kelistrikan, PLN membagi-bagi fungsi unit induknya kedalam beberapa unit induk berdasarkan pada sistem tenaga listrik yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Selain itu ada uga unit induk atau pusat-pusat lain sebagai penunjang berlangsungnya perusahaan. Karena luasnya cakupan wilayah kerja PLN, maka PLN memiliki unit-unit di seluruh wilayah Indonesia yang mempunyai fungsi masing-masing sesuai dengan unit induknya dan dapat dirincikan sebagai berikut :

- a. Kantor Pusat PLN merupakan pusat dari penyelenggara bisnis PLN diseluruh Indonesia. Dimana disinilah para direksi PT.PLN berkantor. Kantor Pusat PLN ini terletak di Jalan Trunojoyo Blok M-1 Melawai, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Dan Kantor Pusat dipimpin oleh Direktur Utama.
- b. Unit Induk atau Unit Pusat merupakan unit dari kantor pusat untuk pelayanan kelistrikan di PLN, serta juga merupakan Lembaga penunjang bisnis kelistrikan PLN di Wilayah. Unit Induk atau Unit Pusat dipimpin oleh seorang General Manager Unit Induk atau General Manager Pusat.
- c. Unit Pelaksana merupakan unit di bawah unit induk/pusat sebagai pembagian wilayah pelayanan PLN kedalam ruang lingkup yang lebih kecil agar pelayanan PLN bisa lebih terfokus dan langsung menyentuh pada masyarakat, contohnya Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) yaitu unit pelaksana dibawah unit induk distribusi dan Unit Pelaksana Transmisi (UPT) yaitu unit pelaksana di bawah unit induk transmisi.

- d. Unit Layanan merupakan unit dibawah unit pelaksana dengan ruang lingkup pembagian dari wilayah unit pelaksana, misalnya dalam satu unit pelaksana terdapat beberapa unit layanan. Tetapi tidak semua unit pelaksana di PLN mempunyai unit layanan, tergantung pada jumlah pelanggan dan area pelayanan unit pelaksana PLN, contoh Unit Layanan Pelanggan (ULP) yaitu unit layanan dibawah UP3, atau Unit Layanan Transmisi dan Gardu induk (ULTG) yaitu unit layanan dibawah UPT.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi PT. PLN (Persero) UP3 Binjai

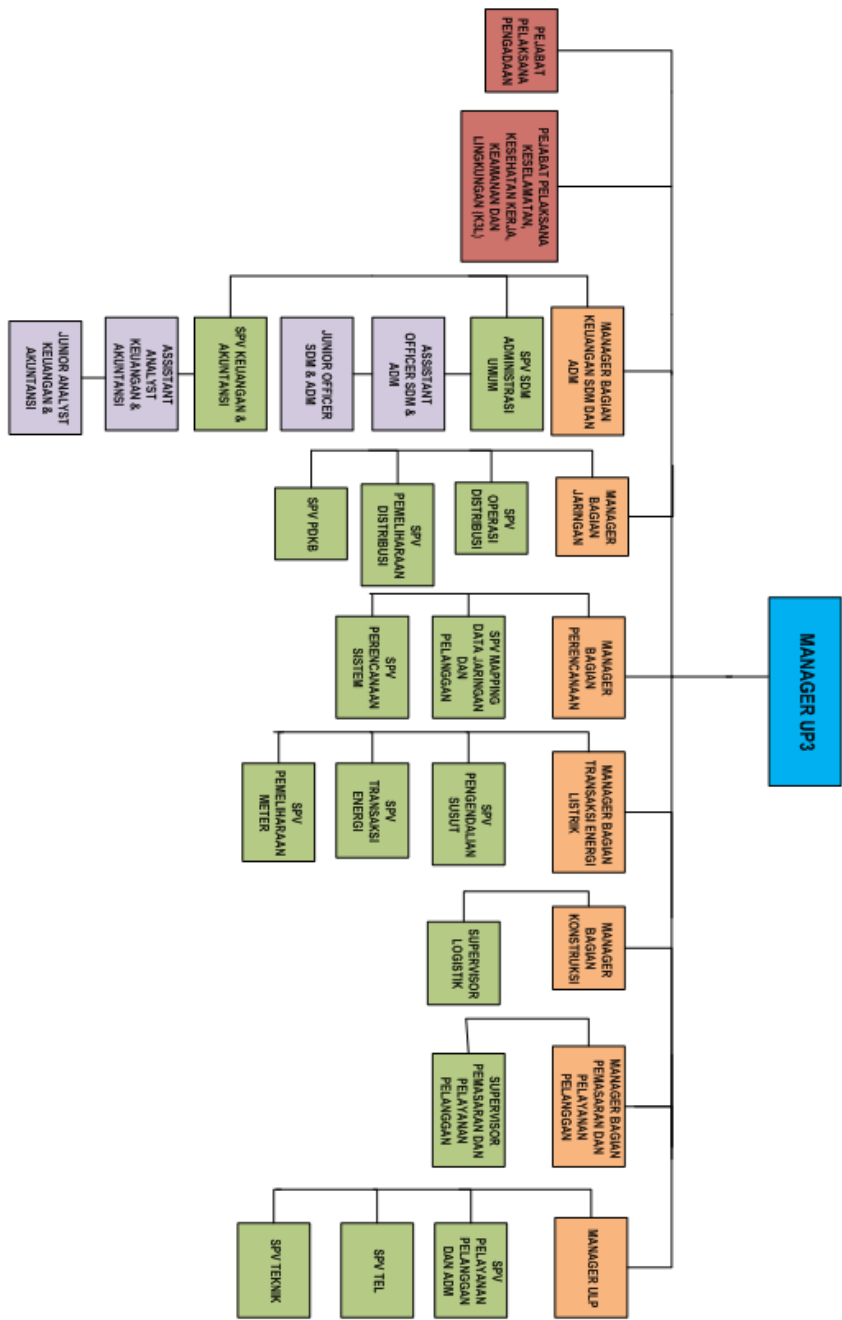
Diakui sebagai perusahaan tenaga listrik yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

2. Misi PT. PLN (Persero) UP3 Binjai

- a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

4.1.3 Uraian Struktur Organisasi Perusahaan

Setiap perusahaan baik itu perusahaan pemerintah maupun swasta mempunyai struktur organisasi, sebab perusahaan juga merupakan sebuah organisasi. Organisasi merupakan suatu sistem dari aktivitas kerjasama yang terorganisasi, yang dilaksanakan oleh sejumlah orang untuk mencapai tujuan bersama. Struktur organisasi telah menetapkan tugas-tugas wewenang serta tanggung jawab setiap orang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan bagaimana hubungan antara satu dengan yang lainnya. Demi menjalankan tugas-tugasnya, PT. PLN (Persero) UP3 Binjai memiliki struktur organisasi yang tertata dengan baik menurut fungsi dan golongannya masing-masing. Tujuan adanya struktur organisasi adalah untuk pencapaian kerja atau pendelegasian dalam organisasi yang berdasarkan pada pola hubungan kerja serta lalu lintas wewenang dan tanggung jawab.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UP3 Binjai

4.1.4 Pembahasan Kegiatan Perusahaan

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab setiap bagian pada PT. PLN (Persero) UP3 Binjai dapat dilihat sebagai berikut :

1. Manager Area

Bertanggung jawab untuk mengkoordinir pengelolaan operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik dan mengelola transaksi energi setenagalistrikan secara efektif dan efisien dengan mutu dan keandalan untuk mencapai target kinerja unit. Adapun rincian tugas pokoknya sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan program kerja dan anggaran sebagai pedoman kerja untuk mencapai kinerja unit.
- b. Mengkoordinasikan program kerja dan anggaran sebagai pedoman kerja untuk mencapai kinerja unit.
- c. Mengoptimalkan PRK unit sebagai bahan penyusunan dokumen RKAU untuk menetapkan arah pencapaian target kinerja.
- d. Mengkoordinir pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) secara optimal untuk mencapai kinerja unit.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan K3 untuk keselamatan dan keamanan pegawai dalam bekerja.
- f. Mengevaluasi perkiraan kebutuhan energi listrik dan pendapatan penjualan tenaga listrik (*bottom-up load forecast*) untuk merencanakan pengusahaan ketenagalistrikan di unit yang dipimpinnya.
- g. Mengoptimalkan operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi untuk mempertahankan keandalan pasokan energi listrik.

- h. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Tata Usaha Langganan (TUL).
- i. Mengevaluasi pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa untuk mendukung operasional perusahaan dalam menunjang pencapaian target kinerja.
- j. Mengkoordinir proses pengelolaan keuangan dan pendapatan.

2. Manager Bagian Keuangan, SDM dan Administrasi

Bertanggung jawab atas kelancaran pengelolaan dan pengendalian kegiatan bidang administrasi dan keuangan yang meliputi sumber daya manusia, kesekretariatan, anggaran, keuangan dan akuntansi untuk mendukung laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu serta mencapai target kinerja sesuai tujuan perusahaan. Adapun rincian tugas pokoknya sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi serta bertanggung jawab atas tersusunnya Cash Flow (Laba/Rugi dan Neraca).
- b. Memverifikasi dan memvalidasi terhadap kelengkapan bukti-bukti pembayaran, tentang kesesuaian persyaratan berkas tagihan serta kelayakannya.
- c. Memberikan persetujuan (sesuai batas kewenangan) atas penerimaan dan pengeluaran dana imperst, berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- d. Memvalidasi buku kas / bank harian.
- e. Mengelola dan memonitor kas opname secara harian.
- f. Mengelola, memonitor dan mengevaluasi terhadap keamanan penyimpanan surat berharga, fisik uang di kantor APJ.
- g. Mengelola, memonitor dan mengevaluasi ketepatan serta kecepatan penerimaan pendapatan.

- h. Memonitor Daftar Pelunasan Harian (DPH) dan Saldo Piutang.
- i. Mengkoordinir penerimaan dan penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
- j. Melaksanakan usaha-usaha penanggulangan atas penyimpangan penerimaan pendapatan (dengan pihak eksternal) dengan pemberian sanksi.
- k. Mengelola, memonitor dan mengevaluasi atas tersusunnya laporan keuangan.
- l. Merencanakan kebutuhan kas jangka pendek dan melaksanakan pembayaran dengan giro / *cheque*.
- m. Membuat laporan rutin dan berkala sesuai dengan bidang tugasnya.
- n. Menyusun program kerja dan anggaran fungsi SDM dan Administrasi sebagai pedoman kerja.
- o. Mengelola, memonitor dan mengevaluasi proses dan biaya pegawai administrasi, kesekretariatan dan pencapaian target HOP untuk mendapatkan efisiensi biaya perusahaan.
- p. Mengevaluasi kinerja dan mengusulkan peningkatan kompetensi staf untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
- q. Menyusun usulan formasi tenaga kerja (FTK) termasuk tenaga Outsourcing.
- r. Mengelola, memonitor dan mengevaluasi usulan peningkatan kompetensi SDM dan merencanakan usulan diklat / kursus untuk meningkatkan kompetensi staf dan SDM.
- s. Memverifikasi perhitungan pajak penghasilan (PPh Ps.21) pegawai dan pensiunan serta rekonsiliasi tagihan dana pensiun PLN.

3. Manager Bagian Jaringan

Bertanggung jawab untuk mengkoordinir rencana dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi. Adapun rincian tugas pokoknya sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan Program Rencana Kerja (PRK) untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi, PDKB, serta pembangkit.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi.
- d. Melakukan Analisa dan evaluasi kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi termasuk PDKB.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja proteksi distribusi dan pelayanan teknik.
- f. Melakukan verifikasi dan validasi aset distribusi secara periodic.
- g. Mengkoordinasikan penyusunan dan mengendalikan pelaksanaan SOP untuk setiap pekerjaan distribusi guna tercapainya *zero accident*.
- h. Melakukan koordinasi dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi dengan rayon.
- i. Menyusun pola operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi yang efisien.
- j. Mengevaluasi hasil kerja dari pihak ketiga.

4. Manager Bagian Perencanaan

Bertanggung jawab untuk mengkoordinir kegiatan perencanaan pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik dan kegiatan lain yang terkait dengan operasional area. Adapun rincian tugas pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyusun dan mengevaluasi RKAU Area.
- b. Menyusun dan mengevaluasi alokasi, serta mengendalikan dan melaporkan realisasi anggaran operasi dan investasi.
- c. Menyusun dan mengevaluasi usulan dan revisi SKK.
- d. Menyusun dan mengevaluasi Program Rencana Kerja (PRK) Area serta memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaannya.
- e. Mengevaluasi dan mengembangkan sistem dan kontruksi distribusi tenaga listrik area dan rayon.
- f. Menyusun dan mengevaluasi rekomendasi sistem PB/PD pelanggan TM terkait perubahan sistem TM ke unit induk.
- g. Mengkoordinir dan mengevaluasi *mapping* data jaringan pelanggan.
- h. Memonitoring dan mengevaluasi kinerja unit.
- i. Menyiapkan data pendukung dalam penyusunan RUPTL dan *Roadmap Lisdes*.
- j. Mengevaluasi data aset distribusi.

5. Manager Bagian Transaksi Energi dan Listrik

Bertanggung jawab untuk mengkoordinir kegiatan transaksi energi di Area/Rayon/Unit terkait, pengendalian susut dan pemeliharaan meter transaksi. Adapun rincian tugas pokoknya sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan *manajemen billing*.
- b. Mengkoordinasikan proses-proses *billing* pada sistem AP2T dengan aplikasi pendukung.
- c. Memonitoring dan mengendalikan realisasi penggunaan anggaran SKKI/SKKO.
- d. Mengevaluasi pengendalian surat nonteknis, PJU, P2TL, AMR, pemeliharaan APP, pemeliharaan meter transaksi dan hasil ukur meter transaksi.
- e. Mengevaluasi rencana program pemeliharaan meter transaksi.
- f. Memonitor pelaksanaan *settlement* antar unit pelaksana, UPT, dan IPP dalam pengelolaan transfer *price energy*.
- g. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pemasangan dan pemeliharaan AMR.
- h. Merencanakan dan mengevaluasi pekerjaan pemeliharaan APP dan hasil penerapan *metrology* secara berkala.
- i. Memonitoring dan mengevaluasi manajemen APP.
- j. Mengkoordinasikan kegiatan *Wiring* dan *Setting* APP dan percepatan pemasangan APP pelanggan baru.

6. Manager Bagian Konstruksi

Bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan proyek pembangkit dan jaringan, konsolidasi unit-unit proyek sesuai dengan jadwal, biaya, dan kualitas pekerja melalui pemantauan hasil kerja jasa manajemen konstruksi untuk pencapaian target kinerja produksi. Adapun rincian tugas pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja staf operasi sesuai rencana kerja proyek induk.
- b. Merumuskan dan mengevaluasi kinerja bidang serta sosialisasi penerapannya.
- c. Mengkoordinasi kegiatan pelaksanaan administrasi teknik yang meliputi administrasi, tenaga asing, kontrak-kontrak dan berita pembayaran.
- d. Mengkoordinasi kegiatan pengadaan dan pengendalian sarana kerja.

7. Manager Bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan

Bertanggung jawab atas pengelolaan peningkatan pelayanan pelanggan, pengelolaan peningkatan Integritas Layanan Publik (ILP), melaksanakan koordinasi dan memberikan pengarahannya kepada Rayon, melaksanakan strategi pemasaran, serta melakukan pembinaan terhadap UPJ yang sesuai dengan fungsi pekerjaannya. Adapun rincian tugas pokoknya sebagai berikut :

- a. Mengendalikan dan mengevaluasi kebutuhan dan penyerapan anggaran fungsi pelayanan sesuai RKAP.
- b. Memonitor pemeliharaan data Arsip Induk Langganan / AIL.
- c. Menyusun rencana kerja dan anggaran strategi pemasaran, peningkatan pelayanan, dan tata usaha langganan.
- d. Melakukan riset dan segmentasi pasar.
- e. Melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja pemasaran, pelayanan pelanggan serta tata usaha langganan.
- f. Membuat Surat Izin Penyambungan (SIP), mengelola dan mengevaluasi Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SP JBTL) pelanggan besar agar tercapai tertib administrasi.
- g. Mengkoordinir pemasaran kreatif, promosi produk / penjualan dan sosialisasi produk dan perubahan harga jual listrik.

- h. Mengusulkan kuota PB dan target penjualan untuk UPJ.
- i. Memonitor dan mengevaluasi proses pelaksanaan penyambungan baru perubahan daya (PB/PD) dan penyambungan sementara.
- j. Mengelola dan memutakhirkan Data Induk Pelanggan (DIL).

8. Urusan Pelaksana Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan, dan Lingkungan (K3L)

Bertanggung jawab untuk mengelola, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan keamanan, keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan kerja.

Adapun rincian tugas pokoknya sebagai berikut :

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja serta memadamkan kebakaran.
- b. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja.
- c. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban lingkungan.
- d. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
- e. Mencegah terkena sengatan aliran listrik.
- f. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang potensi bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

9. Supervisor Pelaksana Pengadaan

Bertanggung jawab untuk mengelola proses pengadaan barang / jasa mulai dari pengumuman, penjelasan, evaluasi, mempersiapkan perjanjian/kontrak tepat social ekonomi dan tepat harga. Adapun rincian tugas pokoknya sebagai berikut :

- a. Melakukan analisis, menyusun jadwal dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap lingkup pengadaan barang / jasa yang akan dilakukan.
- b. Memberikan penjelasan dokumen pengadaan dan melakukan evaluasi, klarifikasi serta negosiasi terhadap dokumen penawaran barang/jasa.

- c. Melakukan *contract discussion agreement (CDA)* bila diperlukan dan menyiapkan draft perjanjian/kontrak.
- d. Melaporkan dan mengusulkan hasil proses pengadaan barang/jasa kepada atasan langsung supaya selanjutnya dapat disampaikan kepada *value for money committee* untuk pengadaan barang/jasa yang memerlukan rekomendasi *value for money committee*.
- e. Menilai kualifikasi calon penyedia barang/jasa dalam hal pengadaan yang memiliki prakualifikasi atau pasca kualifikasi yang tidak memiliki DPT.
- f. Memastikan calon penyedia barang/jasa tidak termasuk dalam daftar hitam PLN dan melakukan pengumuman / undangan kepadacalon penyedia barang dan jasa.
- g. Mengumumkan pemenang (penyedia barang/jasa).
- h. Menjawab sanggahan dari calon penyedia barang/jasa.
- i. Menyiapkan surat penunjukkan penyedia barang/jasa.
- j. Memonitoring, menganalisa, dan mendokumentasikan proses pengadaan.

10. Supervisor Keuangan dan Akuntansi

Bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran serta pengelolaan keuangan. Adapun rincian tugas pokoknya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengelolaan fungsi keuangan dan akuntansi.
- b. Melaksanakan rekonsiliasi data dengan fungsi terkait atas pendapatan, bank, hutang-piutang, persekot dinas dan PUMP-KPR/BPRP.
- c. Menyiapkan rincian biaya di Rayon untuk rencana alokasi dana operasional.
- d. Memverifikasi dan validasi terhadap kelengkapan transaksi pembayaran.
- e. Memastikan berkas penagihan terkirim ke Wilayah sesuai dengan SOP.

11. Supervisor SDM dan Administrasi

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SDM, tata usaha secretariat, rumah tangga, keamanan, keselamatan, dan kesehatan lingkungan kerja dan kegiatan umum lainnya. Pengendalian tenaga kerja tata laksana perbekalan. Pelaksanaan bidang kehumasan serta penanganan masalah hukum. Adapun rincian tugas pokoknya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengelolaan tenaga kerja.
- b. Melaksanakan sarana kerja dan administrasi perkantoran.
- c. Melaksanakan fungsi kehumasan.
- d. Menyiapkan data pendukung RKAU untuk bagian pelayanan dan administrasi.
- e. Memonitoring pelaksanaan HCR dan OCR.

12. Supervisor Operasi Distribusi

Bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan pengoperasian jaringan distribusi sesuai SOP untuk menjamin keandalan, keamanan, mutu dan efisiensi penyaluran tenaga listrik. Adapun rincian tugas pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyusun Program Rencana Kerja (PRK) Operasi.
- b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Operasi Jaringan Distribusi sesuai SOP.
- c. Melaksanakan pemutakhiran data aset distribusi secara berkala.
- d. Melakukan pengendalian pengoperasian jaringan distribusi.
- e. Mengendalikan dan monitoring pelaksanaan operasional pelayanan teknik.

- f. Mengkoordinasi dengan Area, rayon dan Instansi terkait dalam rangka operasi jaringan distribusi.
- g. Mengevaluasi kinerja operasi.

13. Supervisor Pemeliharaan Distribusi

Bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan jaringan distribusi untuk meningkatkan keandalan, keamanan, mutu dan efisiensi jaringan distribusi. Adapun rincian tugas pokoknya sebagai berikut :

- a. Merencanakan penyusunan Program Rencana Kerja (PRK).
- b. Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan jaringan distribusi sesuai SOP dan anggaran yang ditetapkan.
- c. Merencanakan kebutuhan material operasi dan pemeliharaan untuk meningkatkan keandalan dan keamanan jaringan distribusi termasuk PRK.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan rayon dan bagian terkait dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan distribusi.
- e. Menyiapkan peralatan kerja untuk operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi.

14. Supervisor PDKB

Bertanggung jawab dalam mengelola pekerjaan PDKB untuk meningkatkan keandalan, keamanan, mutu dan efisiensi jaringan distribusi. Adapun rincian tugas pokoknya sebagai berikut :

- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pekerjaan PDKB.
- b. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan PDKB sesuai dengan SOP.

- c. Mengusulkan Surat Perintah Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (SP2B) dan Surat Penunjukan Pengawas Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (SP3B) kepada Kepala Operasi.
- d. Melaksanakan inventarisasi dan mengusulkan peremajaan peralatan PDKB.
- e. Memonitor masa berlaku dan mengusulkan sertifikat kompetensi / *brevet* personil PDKB.
- f. Mengusulkan revisi SOP atau mengajukan SOP baru ke komisi PDKB.
- g. Melaporkan penyelesaian pekerjaan kepada Kepala Operasi.

15. Supervisor Mapping Data Jaringan dan Pelanggan

Bertanggung jawab dalam mengembangkan aplikasi jaringan distribusi, mengelola database Data Induk Jaringan (DIJ), aplikasi mapping dan infrastruktur TI, untuk menunjang operasional di Area AP Prima. Adapun rincian tugas pokoknya sebagai berikut :

- a. Memelihara dan mengelola Data Induk Jaringan (DIJ) distribusi berbasis geografis (GIS).
- b. Melakukan rekonsiliasi data DIL dan DIJ.
- c. Merencanakan dan memelihara aplikasi serta infrastruktur TI terkait dengan *Mapping*.
- d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan survey, data entri dan proses pemutahiran Data Induk Jaringan (DIJ).
- e. Mengelola pengarsipan BATG pada satu Arsip Induk Gardu (AIG).
- f. Memberikan identitas / penomoran gardu distribusi dan tiang.
- g. Memeriksa bahan-bahan untuk laporan LBT.

- h. Membuat usulan pengembangan aplikasi pengolahan data terintegrasi antara Internal Area.

16. Supervisor Perencanaan Sistem

Bertanggung jawab dalam merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, mengendalikan, memonitor, serta melakukan Kajian Kelayakan Operasional, Kajian Kelayakan Lingkungan, Kajian Kelayakan Finansial dan Analisa Resiko terhadap pembangunan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik atau kegiatan lain yang terkait dengan investasi jaringan distribusi. Adapun rincian tugas pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan, mengolah, mengkoordinasikan dan menyusun Pedoman Rencana Kerja (PRK JTL) Area.
- b. Memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan Pedoman Rencana Kerja JTL.
- c. Melakukan KKO, KKL, KKF dan Analisa resiko terhadap PRK JTL.
- d. Menyiapkan dan membuat laporan rekomendasi Sistem PB/PD pelanggan di atas 200 kVA dan atau PB/PD dibawah 200 kVA terkait perubahan sistem tegangan menengah (pembangunan dan perubahan gardu/instalasi dan JTM nya).
- e. Menyiapkan dan membuat laoporan rekomendasi Sistem PB/PD pelangga di atas 41,5 kVA sampai dengan 197 kVA terkait perubahan sistem tegangan rendah (JTR).
- f. Memantau pencapaian Sasaran Mutu yang telah disepakati dalam ISO di bidang Perencana Distribusi.

17. Supervisor Pengendalian Susut

Bertanggung jawab atas kegiatan pengendalian susut jaringan, menerbitkan PJU/reklame liar dan pelaksanaan P2TL. Adapun rincian tugas pokoknya sebagai berikut :

- a. Memonitor pelaksanaan penekanan susut dan berkoordinasi dengan bagian atau rayon terkait.
- b. Memetakan dan melaporkan perkembangan susut Area dan Rayon secara berkala.
- c. Melakukan updating data PJU secara berkala.
- d. Melakukan koordinasi dan pengawasan hasil P2TL yang telah dilakukan dengan bagian atau Rayon terkait.
- e. Melakukan evaluasi kinerja pihak ketiga berdasarkan SLA.
- f. Membuat target operasi serta memonitor pelaksanaan P2TL secara rutin.
- g. Memastikan kelengkapan P2TL sesuai aturan.
- h. Melaksanakan komunikasi dengan bagian terkait dan instansi berwenang untuk pelaksanaan P2TL.
- i. Melakukan Analisa dan evaluasi (ANEV) atas hasil pelaksanaan P2TL.

18. Supervisor Transaksi Energi

Bertanggung jawab atas kegiatan pemeliharaan meter transaksi untuk akurasi pengukuran pemakaian eneri listrik. Adapun rincian tugas pokoknya sebagai berikut :

- a. Memonitor program pemeliharaan meter transaksi yang disebabkan oleh meter rusak, buram ,macet dan tua
- b. Memonitor pelaksanaan pemasangan dan pemeliharaan AMR

- c. Merencanakan kebutuhan Kwh meter untuk pemeliharaan
- d. Memonitor pelaksanaan hasil penerapan metrology secara berkala
- e. Menyiapkan dan pendukung RKAP untuk kebutuhan pemeliharaan meter transaksi
- f. Memonitor pekerjaan pemeliharaan dan tera ulang APP serta meter elektronik (ME) dan sistem AMR yang dikerjakan pihak ketiga
- g. Melaksanakan pengujian alat ukur, pembatas dan kelengkapannya untuk material baru atau bekas andal.
- h. Memonitor manajemen segel APP.

19. Supervisor Pemeliharaan Meter

Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian manajemen baca meter, pengelolaan rekening atas penjualan tenaga listrik kepada pelanggan yang dilaksanakan secara akurat dan tepat waktu, memelihara perangkat lunak dan perangkat keras serta memuktahirkan database pelanggan (*Data Base Administrator – DBA*). Adapun rincian tugas pokoknya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan manajemen baca meter.
- b. Melaksanakan pengelolaan rekening.
- c. Bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras.
- d. Bertanggung jawab atas pemeliharaan data base (sebagai *Data Base Administrator*).

20. Supervisor Logistik

Bertanggung jawab atas kegiatan penyimpanan dan distribusi barang serta penyimpanan file-file di tim logistik. Adapun rincian tugas pokoknya sebagai berikut :

- a. Mengkoordinir dan memonitor pelaksanaan penerimaan, penataan, pengiriman dan muat barang, koordinasi tim logistik, dan pembuatan laporan yang berkaitan dengan aktifitas kerja.
- b. Melakukan pengecekan secara rutin terhadap perlengkapan, jumlah, kondisi barang yang ada di dalam Gudang (*Stock Opname*).
- c. Memberi pengarahan dan melatih staf Gudang agar dapat bekerja dengan baik.
- d. Mengawasi, mengontrol dan mendisiplinkan karyawan Gudang.

21. Supervisor Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan

Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan fungsi pelayanan pelanggan, administrasi pelanggan dan pengelolaan pendapatan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan pengamanan pendapatan. Adapun rincian tugas pokoknya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan mensupervisi fungsi pelayanan pelanggan sesuai dengan proses bisnis.
- b. Melaksanakan kunjungan pelanggan potensial (TM/TT).
- c. Menyiapkan rencana tingkat mutu pelayanan secara periodik.
- d. Melaksanakan kegiatan riset pasar dan menyusun data potensi pasar (*Captive Power*).

- e. Mengolah peta segmentasi pelanggan.
- f. Memastikan proses PB/PD dan SPJBTL pelanggan potensial sesuai kewenangannya.
- g. Memonitor penerbitan SIP/SPJBTL.
- h. Memonitor mutase data induk langganan dan memelihara arsip induk langganan.
- i. Memonitor laporan penagihan lain-lain (multi guna, P2TL, BP).
- j. Memonitor dan mensuoervisi pengendalian piutang pelanggan.
- k. Memonitor proses keputusan sementara, bongkar, rampung, piutang ragu-ragu dan usulan penghapusan piutang.

22. Assistant Analyst Keuangan dan Akuntansi

Bertanggung jawab untuk memverifikasi dokumen tagihan operasi dan tagihan investasi serta mngevaluasi Surat Permohonan Membayar (SPM). Adapun rincian tugas pokoknya sebagai berikut :

- a. Memverifikasi dan menyiapkan data yang mendukung laporan keuangan.
- b. Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk mendukung laporan keuangan.
- c. Melakukan Analisa terhadap data-data transaksi.
- d. Melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi terhadap data-data atas transaksi akuntansi dengan bidang / bagian lainnya.
- e. Menyusun jurnal transaksi keuangan.
- f. Memverifikasi data penerimaan dana operasi dan laporan kas.
- g. Membuat permintaan dana operasi dan investasi ke PLN Wilayah.
- h. Memonitor data pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak.

- i. Membuat pengeluaran dana operasi dan investasi.
- j. Membuat laporan monitoring realisasi penyerapan laporan AKO dan AKI.
- k. Membuat monitoring proses pekerjaan SKK AI.
- l. Melakukan percepatan proses pekerjaan investasi ke SAP.

23. Junior Analyst Keuangan dan Akuntansi

Bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerimaan pendapatan dan pengeluaran serta mempersiapkan dokumen berdasarkan transaksi keuangan. Adapun rincian tugas pokoknya sebagai berikut :

- a. Membuat bukti penerimaan dan pengeluaran.
- b. Menyusun pertanggungjawaban realisasi pembayaran.

24. Assistant Officer SDM dan Administrasi

Bertanggung jawab untuk menerima, mengelola, dan memverifikasi segala surat menyurat yang masuk ataupun keluar. Adapun rincian tugas pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyusun agenda kegiatan kerja internal dan eksternal.
- b. Menerima dan mendistribusikan surat sesuai dengan TLSK.
- c. Melakukan pengadaan material dan jasa borongan untuk pengoperasian dan saran pendistribusian tenaga listrik.
- d. Merencanakan kesekretarisan dan rumah tangga.

25. Junior Officer SDM dan Administrasi

Bertanggung jawab atas data penggajian dan karyawan. Adapun rincian tugas pokoknya sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan pada absensi atau daftar hadir karyawan perusahaan.
- b. Melakukan pembaharuan pada record data perusahaan

- c. Melakukan koordinasi dengan *labour supply*.
- d. Mengelola rumah tangga kantor, kendaraan dan kegiatan kehumasan.

4.1.5 Perlakuan Akuntansi Atas Aset Tetap Berwujud

Perlakuan akuntansi merupakan suatu perbuatan / tindakan yang dilakukan terhadap sebuah kejadian yang berhubungan dengan keuangan. Secara umum perlakuan akuntansi atas aset tetap dibagi kedalam beberapa fase :

a. Fase Perolehan Aset Tetap

Fase perolehan aset tetap adalah fase dimana aset tetap diperoleh hingga tetap tetap tersebut dapat digunakan atau berfungsi. Permasalahan yang timbul pada fase ini meliputi : penilaian (pengukuran), pengakuan (pencatatan), dan pelaporan atas perolehan aset tetap.

b. Fase Penggunaan Aset Tetap

Fase penggunaan aset tetap adalah fase dimana saat aset tetap sudah dan sedang dioperasikan. Permasalahan yang timbul pada fase ini meliputi : pengeluaran, penyusutan dan amortisasi, serta penilaian kembali.

c. Fase Penarikan Aset Tetap

Fase penarikan aset tetap adalah fase dimana saat aset tetap sudah tidak memiliki manfaat ekonomis lagi dimasa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Binjai merupakan dasar bagi kegiatan akuntansi keuangan di perusahaan. PT. PLN (Persero) UP3 Binjai menyajikan laporan keuangan dalam satu periode akuntansi sebanyak empat kali, yaitu laporan keuangan triwulan I untuk bulan Januari sampai Maret, laporan keuangan semester I untuk bulan April sampai Juni,

laporan keuangan triwulan III untuk bulan Juli sampai September, dan laporan keuangan tahun 2018 untuk bulan Oktober sampai Desember.

PT. PLN (Persero) UP3 Binjai merupakan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) area Binjai yang bergerak di bidang distribusi kelistrikan, tentunya perusahaan ini sangat membutuhkan aset tetap untuk melaksanakan aktivitas operasional perusahaan. Perusahaan ini mengartikan aset tetap sebagai harta yang digunakan untuk proses produksi kelistrikan, memiliki manfaat ekonomi bagi perusahaan dan dapat digunakan lebih dari satu periode akuntansi. Cara perolehan aset tetap pada PT. PLN (Persero) UP3 Binjai secara umum ada dua jenis, yaitu dari Pekerjaan Dalam Penyelesaian (PDP) dan dari kapitalisasi biaya pemeliharaan. Aset tetap PT. PLN (Persero) UP3 Binjai meliputi aset yang dapat disusutkan dan yang tidak dapat disusutkan (Tanah).

Perlakuan akuntansi terhadap aset tetap di PT. PLN (Persero) UP3 Binjai didasarkan pada prinsip Standar Akuntansi Keuangan yang dibuat menjadi Standar Keuangan akhir oleh Direksi dan diterapkan oleh perusahaan dari tahun ke tahun serta disesuaikan dengan aturan akuntansi yang berlaku secara umum. Aset tetap yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero) UP3 Binjai terdiri dari tanah dan hak atas tanah, bangunan dan kelengkapan halaman, instalasi dan mesin, perlengkapan penyaluran tenaga listrik, jaringan distribusi, gardu distribusi, perlengkapan lain-lain distribusi, perlengkapan pengolahan data, perlengkapan telekomunikasi, perlengkapan umum, serta kendaraan bermotor dan alat-alat yang mobil. Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang distribusi kelistrikan, PT. PLN (Persero) UP3 Binjai memiliki aset tetap dalam jumlah yang besar dan terdiri dari dua jenis yaitu aset tetap per fungsi dan aset tetap per jenis.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari PT. PLN (Persero) UP3 Binjai, perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang diterapkan perusahaan mulai dari pengakuan, pengukuran, pelaporan, pengeluaran, penyusutan, serta penghentian aset tetap dalam pelaporan keuangan, bisa dilihat dari uraian berikut ini :

a. Pengakuan Aset Tetap di PT. PLN (Persero) UP3 Binjai

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan pada PT. PLN (Persero) UP3 Binjai untuk pengakuan atas aset tetapnya diketahui bahwa pengakuan aset tetap terjadi jika dimulai dengan pengadaan material dulu, kemudian material tadi di pasang dengan bantuan jasa dari pihak ke-3 (vendor), barulah menjadi aset. Karena kalau di PLN itu selesai dulu kerjaan baru dibayar. Pengakuan atas aset tetap juga diketahui bahwa pengakuannya terjadi jika kemungkinan besar aset tetap yang dimiliki memberikan manfaat ekonomi bagi entitas. Maksudnya kepemilikan aset tetap memberikan manfaat ekonomi untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan sehingga bisa memperoleh keuntungan dari penggunaan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan aset tetap harus dapat diukur secara andal, yaitu dengan menjumlahkan harga perolehan dan seluruh biaya yang terjadi hingga aset tetap tersebut siap digunakan. Selain itu, aset tetap diakui ketika diperkirakan untuk digunakan lebih dari suatu periode akuntansi. Pengakuan aset tetap di PT.PLN (Persero) UP3 Binjai diakui, jika adanya jasa ditambah material, maka itulah baru diakui sebagai aset. Maksud dari jasa itu adalah seluruh biaya yang terjadi hingga aset siap digunakan. Ingat saja rumusnya yaitu material ditambah jasa sama dengan aset, itulah yang diterapkan oleh pihak perusahaan.

PT.PLN (Persero) UP3 Binjai menerapkan 2 cara perolehan aset tetapnya, meskipun sebenarnya ada banyak akan tetapi yang umum hanya 2 saja, yaitu :

1. Dari Pekerjaan Dalam Penyelesaian (PDP)

Pada tahap ini, masih material dulu yang dipasang, jasanya belum muncul. Biaya untuk pemasangannya / jasanya belum ada atau belum muncul, karena dikerjakan terlebih dahulu. Sesudah itu barulah jasanya bisa dibayarkan. Ada juga yang kerjanya / nilainya besar, sehingga pembayarannya pun bertahap bisa dari 100% itu biasa dibayar dahulu 30% / 35% baru terakhir 5% itu kalau proyeknya besar.

2. Kapitalisasi biaya pemeliharaan

Kapitalisasi merupakan penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas / efisiensi dan atau untuk memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Ketentuan kapitalisasi aset tetap dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 01/KMK/12/2001 diatur tentang ketentuan-ketentuan kapitalisasi aset tetap diantaranya yaitu :

1. Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan meliputi :

- a. Pembuatan peralatan, mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.
- b. Pembuatan peralatan, mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai

siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan serta biaya perizinan.

b. Pengukuran Aset Tetap di PT. PLN (Persero) UP3 Binjai

Pengukuran aset tetap pada PT.PLN (Persero) UP3 Binjai, dapat diuraikan berdasarkan hasil penelitian yang didapat mengenai perlakuan akuntansi aset tetapnya. Perusahaan menjelaskan bahwa harga perolehan aset tetap meliputi harga material, serta biaya-biaya yang dikeluarkan sampai aset yang bersangkutan siap digunakan. Penentuan harga perolehan untuk setiap aset tetap yang dimiliki oleh PT.PLN (Persero) UP3 Binjai, yaitu dengan menjumlahkan harga perolehan aset dengan seluruh biaya yang terjadi untuk memperoleh aset tetap tersebut. Pencatatan aset tetap didasarkan atas harga perolehannya masing-masing dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset tetap.

c. Pelaporan Aset Tetap di PT. PLN (Persero) UP3 Binjai

PSAK No.16 menyatakan bahwa aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyajian aset tetap di neraca harus disajikan secara terpisah seperti : tanah dan hak atas tanah, bangunan dan kelengkapan halaman, instalasi dan mesin, perlengkapan penyaluran tenaga listrik, jaringan distribusi, gardu distribusi, perlengkapan lain-lain distribusi, perlengkapan pengolahan data, perlengkapan telekomunikasi, perlengkapan umum, serta kendaraan bermotor dan alat-alat yang mobil. Pengungkapannya harus lengkap dan sistematis agar lebih mudah dipahami, karena neraca merupakan sumber informasi terpenting dalam laporan keuangan.

Terkait dengan penyajian aset tetap dalam neraca, diketahui bahwa hasil penelitian yang dilakukan pada PT. PLN (Persero) UP3 Binjai dalam hal pelaporan atas aset tetapnya atas laporan keuangan, masih terdapat beberapa hal yang belum diterapkan perusahaan. PT. PLN (Persero) UP3 Binjai menyajikan aset tetapnya di neraca dengan nilai keseluruhan bukan disajikan secara terperinci sesuai dengan jenis dari masing-masing aset tetapnya dan penyajian akumulasi penyusutannya dimaksudkan sebagai pengurang atas aset tetap agar mudah dipahami pembaca atau pengguna laporan keuangan. Contoh penyajian jumlah tercatat aset tetap di neraca PT.PLN (Persero) UP3 Binjai dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Keterangan	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
Aset Tetap (Netto)	1,549,791,630,048	1,293,103,521,495
Aset Tetap (Bruto)	1,570,077,781,148	1,374,262,477,134
Akumulasi Penyusutan	(20,286,151,100)	(81,158,955,639)

Sumber : Neraca PT.PLN (Persero) UP3 Binjai, 2018

d. Pengeluaran Aset Tetap di PT. PLN (Persero) UP3 Binjai

PSAK No.16 menyatakan bahwa pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan. Ada dua perlakuan untuk pengeluaran secara umum, yaitu :

1. Pengeluaran modal (capital expenditure), yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, menambah kapasitas aset tetap atau memperpanjang masa manfaat aset tetap. Pengeluaran modal tidak dibebankan langsung sebagai

beban dalam laporan laba rugi, tapi dicatat dengan cara mendebit akun aset tetap di neraca, karena pengeluaran modal akan memberikan manfaat bagi perusahaan dimasa mendatang.

2. Pengeluaran Pendapatan (revenue expenditure), yaitu biaya yang langsung dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan dimana biaya terjadi (dikeluarkan).

PT. PLN (Persero) UP3 Binjai melakukan beberapa perlakuan untuk pengeluaran aset tetapnya selama masa penggunaan aset tetap tersebut, yaitu pengeluaran modal pada material distribusi utama yang paling besar seperti : jaringan distribusi untuk kabel dan tiang, gardu distribusi untuk transformator, serta perlengkapan distribusi untuk kwh meter. Selain itu, ada juga bangunan yang jika hanya direnovasi serta instalasi untuk pengeluaran mesin.

Aset tetap jenis pengolahan komputer serta kendaraan & alat-alat motor dulu ada fisiknya dan dicatat keberadaanya, namun sekarang sudah tidak dicatat lagi keberadaanya karena sudah disewa semua. PT. PLN (Persero) UP3 Binjai menganggap kedua jenis aset tetap tersebut memiliki biaya pemeliharaan yang mahal, sehingga membuat perusahaan memutuskan untuk menyewanya saja agar urusannya jauh lebih mudah. Penyewaan itu biasa batasnya 3 tahun lalu kemudian akan putus kontrak dan membuat kontrak baru kembali.

e. Penyusutan Aset Tetap di PT. PLN (Persero) UP3 Binjai

Setiap aset tetap pada PT.PLN (Persero) UP3 Binjai dipisahkan menurut golongan aset tetap nya masing-masing seperti bangunan dan kelengkapan halaman, instalasi dan mesin, perlengkapan penyaluran tenaga listrik, jaringan distribusi, gardu distribusi, perlengkapan lain-lain distribusi, perlengkapan

pengolahan data, dan perlengkapan telekomunikasi. Semua aset tetap tersebut disusutkan setiap tahunnya selama umur manfaat dari masing-masing aset tetap.

Perlakuan akuntansi untuk penyusutan aset tetap pada PT.PLN (Persero) UP3 Binjai dialokasikan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method), dimana harga perolehan aset tetapnya akan dikurangi dengan nilai residu kemudian dibagi dengan umur manfaat aset tetap itu sendiri. Metode ini nantinya akan menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah.

f. Penghentian Aset Tetap di PT. PLN (Persero) UP3 Binjai

Penghentian aset tetap pada PT.PLN (Persero) UP3 Binjai yaitu, pada saat umur ekonomisnya habis atau pada saat aset tersebut sudah tidak memiliki manfaat lagi bagi perusahaan. Setiap aset tetap yang dimiliki PT.PLN (Persero) UP3 Binjai memiliki masa manfaat masing-masing. Ketika suatu aset telah habis disusutkan atau sudah tidak bisa digunakan lagi, aset tetap tersebut akan dieliminasi pencatatannya dari pelaporan keuangan. Perlakuan akuntansi untuk penghentian aset tetap di PT.PLN (Persero) UP3 Binjai adalah :

1. Pemusnahan

Aset tetap yang sudah melewati masa manfaat dan mengalami kerusakan sehingga tidak bisa digunakan lagi dalam kegiatan operasional akan dihentikan penggunaannya. Aset tetap yang akan dimusnahkan tersebut, dikumpulkan untuk kemudian dimusnahkan dengan cara dan ketentuan yang sesuai dengan kebijakan perusahaan.

2. Penghapusan

Penghapusan aset tetap perusahaan bukan karena aset tetap tersebut sudah melampaui masa manfaatnya, namun jika perusahaan mengalami kecurian serta bencana alam yang menyebabkan perusahaan kehilangan aset tetap yang dimiliki.

4.2 Pembahasan

Data penelitian yang telah dikumpulkan diperoleh dari hasil pengamatan serta observasi yang telah dilakukan pada PT. PLN (Persero) UP3 Binjai. Penelitian dilakukan dengan teknik wawancara kepada staff akuntansi dan keuangan serta teknik dokumentasi yang berupa data tertulis laporan keuangan perusahaan serta daftar aset tetap perusahaan. Data penelitian yang telah diperoleh tersebut akan dibandingkan dengan ketentuan yang berdasarkan pada PSAK No.16 (2018) tentang aset tetap. Pembahasan perbandingan antara PSAK No.16 (2018) dengan perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang diterapkan di PT. PLN (Persero) UP3 Binjai dapat dilihat pada tabel 4.1 sampai tabel 4.6 berikut ini :

4.2.1 Analisis Pengakuan Aset Tetap pada PT. PLN (Persero) UP3 Binjai

Pengakuan merupakan sebuah proses penetapan pencatatan suatu kejadian atau peristiwa menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan dari entitas pelaporan yang bersangkutan. Berikut adalah tabel perbandingan pengakuan aset tetap pada PT. PLN (Persero) UP3 Binjai dengan PSAK No.16 (2018) :

Tabel 4.2 Perbandingan pengakuan aset tetap oleh PT. PLN (Persero) UP3 Binjai dengan PSAK No.16 (2018)

PSAK Nomor 16	PT.PLN (Persero) UP3 Binjai	Sesuai / Belum Sesuai
a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrative.	Aset tetap bagi perusahaan adalah harta yang digunakan untuk proses produksi kelistrikan.	Sesuai
b. Diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode	Perusahaan mengakui aset tetapnya untuk digunakan selama lebih dari satu periode jika sudah dilakukan pengadaan material yang ditambah dengan jasa.	Sesuai
c. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut.	Pengakuan aset tetap pada perusahaan terjadi saat adanya pengadaan material yang di pasang dengan terlebih dahulu dengan bantuan jasa dari pihak ke-3 (vendor), barulah diakui menjadi aset yang dianggap akan memberikan manfaat ekonomik dimasa yang akan datang.	Sesuai
d. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal.	Jika adanya jasa ditambah material, maka itulah baru diakui sebagai aset. Dan jasa itu termasuk di dalamnya biaya-biaya yang dapat diukur secara andal	Sesuai

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan perlakuan akuntansi terhadap pengakuan aset tetap yang diterapkan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Binjai telah sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan pada PSAK No.16 (2018).

4.2.2 Analisis Pengukuran Aset Tetap pada PT. PLN (Persero) UP3 Binjai

Pengukuran adalah sebuah proses penempatan nilai uang demi mengakui dan memasukkan setiap pos pada laporan keuangan. Berikut adalah tabel perbandingan pengukuran aset tetap pada PT. PLN (Persero) UP3 Binjai dengan PSAK No.16 (2018) :

Tabel 4.3 Perbandingan pengukuran aset tetap oleh PT. PLN (Persero) UP3 Binjai dengan PSAK No.16 (2018)

PSAK Nomor 16	PT.PLN (Persero) UP3 Binjai	Sesuai / Belum Sesuai
a. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain	Penentuan harga perolehan untuk setiap aset tetap yang dimiliki oleh PT.PLN (Persero) UP3 Binjai, yaitu dengan menjumlahkan harga perolehan aset dengan seluruh biaya yang terjadi untuk memperoleh aset tetap tersebut. Pencatatan aset tetap didasarkan atas harga perolehannya masing-masing dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset tetap.	Sesuai
b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut	Pencatatan aset tetap perusahaan didasarkan pada harga perolehannya masing-masing kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutannya	Sesuai

siap digunakan sesuai dengan intensi manajernen		
---	--	--

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan perlakuan akuntansi terhadap pengukuran aset tetap yang diterapkan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Binjai telah sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan pada PSAK No.16 (2018).

4.2.3 Analisis Pelaporan Aset Tetap pada PT. PLN (Persero) UP3 Binjai

Pelaporan adalah sebuah proses penjelasan secara naratif atau rincian menyangkut angka-angka yang tertera dalam laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Berikut adalah tabel perbandingan pelaporan aset tetap pada PT. PLN (Persero) UP3 Binjai dengan PSAK No.16 (2018) :

Tabel 4.4 Perbandingan pelaporan aset tetap oleh PT. PLN (Persero) UP3 Binjai dengan PSAK No.16 (2018)

PSAK Nomor 16	PT.PLN (Persero) UP3 Binjai	Sesuai/Belum sesuai
a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto.	Perusahaan tidak mengungkapkan dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto saat pelaporan.	Belum Sesuai
b. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan	Perusahaan tidak menyajikan umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan saat pelaporan.	Belum Sesuai
c. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir	Perusahaan melakukan perhitungan di setiap akhir tahun (periode) dan disajikan dalam neraca pada awal periode selanjutnya.	Sesuai

periode.		
d. Setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.	Perusahaan menyajikan nilai aset tetap pada neraca sebesar nilai buku, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.	Sesuai
d. Setiap jenis aset seperti tanah, bangunan, kendaraan, inventaris kantor dan lain sebagainya harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci	Perusahaan menyajikan aset tetap di neraca menggunakan total nilai keseluruhan dari aset tetap, bukan disajikan secara terperinci sesuai dengan jenis dari masing-masing aset tetap tersebut.	Belum sesuai
e. Penyusutan untuk suatu periode diakui dalam laba rugi	Perusahaan tidak mencatatkan biaya penyusutan pada laporan laba rugi.	Belum Sesuai

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan perlakuan akuntansi terhadap pelaporan aset tetap yang diterapkan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Binjai diantaranya ada beberapa yang belum sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan pada PSAK No.16 (2018).

4.2.4 Analisis Pengeluaran Aset Tetap pada PT. PLN (Persero) UP3 Binjai

Pengeluaran adalah Suatu pembayaran yang dilakukan untuk kewajiban pada masa akan datang dalam rangka memperoleh keuntungan. Berikut adalah tabel perbandingan pengeluaran aset tetap pada PT. PLN (Persero) UP3 Binjai dengan PSAK No.16 (2018) :

Tabel 4.5 Perbandingan pengeluaran aset tetap oleh PT. PLN (Persero) UP3 Binjai dengan PSAK No.16 (2018)

PSAK Nomor 16	PT.PLN (Persero) UP3 Binjai	Sesuai / Belum Sesuai
a. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aktiva yang bersangkutan.	Perusahaan melakukan beberapa perlakuan untuk pengeluaran aset tetapnya selama masa penggunaan aset tetap tersebut, yaitu pengeluaran modal pada material distribusi utama yang paling besar seperti : jaringan distribusi untuk kabel dan tiang, gardu distribusi untuk transformator, serta perlengkapan distribusi untuk kwh meter. Selain itu, ada juga bangunan yang jika hanya direnovasi serta instalasi untuk pengeluaran mesin.	Sesuai

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan perlakuan akuntansi terhadap pengeluaran aset tetap yang diterapkan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Binjai telah sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan pada PSAK No.16 (2018).

4.2.5 Analisis Penyusutan Aset Tetap pada PT. PLN (Persero) UP3 Binjai

Penyusutan merupakan suatu alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Berikut adalah tabel perbandingan penyusutan aset tetap pada PT. PLN (Persero) UP3 Binjai dengan PSAK No.16 (2018) :

Tabel 4.6 Perbandingan penyusutan aset tetap oleh PT. PLN (Persero) UP3 Binjai dengan PSAK No.16 (2018)

PSAK Nomor 16	PT.PLN (Persero) UP3 Binjai	Sesuai / Belum sesuai
a. Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset tetap disusutkan secara terpisah.	Setiap aset tetap yang dimiliki perusahaan disusutkan secara terpisah sesuai dengan jenisnya masing-masing.	Sesuai
c. Jumlah tersusutkan dari suatu aset dialokasikan secara sistematis sepanjang umur manfaatnya	Penyusutan aset tetap pada perusahaan dilakukan berdasarkan umur manfaat aset tetap yang bersangkutan	Sesuai
d. Metode penyusutan yang digunakan mencerminkan pola pemakaian manfaat ekonomik masa depan aset yang diharapkan oleh entitas. Metode tersebut antara lain metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi.	Penyusutan aset tetap pada PT.PLN (Persero) UP3 Binjai dialokasikan dengan menggunakan metode garis lurus (straingt line method), dimana harga perolehan aset tetapnya akan dikurangi dengan nilai residu kemudian dibagi dengan umur manfaat aset tetap itu sendiri.	Sesuai

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan perlakuan akuntansi terhadap penyusutan aset tetap yang diterapkan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Binjai telah sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan pada PSAK No.16 (2018).

4.2.6 Analisis Penghentian Aset Tetap pada PT. PLN (Persero) UP3 Binjai

Penghentian merupakan suatu pelepasan atas aset tetap yang sudah tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Berikut adalah tabel perbandingan penghentian aset tetap pada PT. PLN (Persero) UP3 Binjai dengan PSAK No.16 (2018) :

Tabel 4.7 Perbandingan penghentian aset tetap oleh PT. PLN (Persero) UP3 Binjai dengan PSAK No.16 (2018)

PSAK Nomor 16	PT.PLN (Persero) UP3 Binjai	Sesuai / Belum sesuai
a. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.	Penghentian aset tetap pada PT.PLN (Persero) UP3 Binjai yaitu, pada saat umur ekonomisnya abis atau pada saat aset tersebut sudah tidak memiliki manfaat lagi dimasa yang akan datang dari penggunaannya.	Sesuai
b. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi ketika aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya.	Perusahaan mengakui adanya keuntungan atau kerugian yang timbul dalam laporan laba rugi akibat dari pelepasan aset tetap	Sesuai

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan perlakuan akuntansi terhadap penghentian aset tetap yang diterapkan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Binjai telah sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan pada PSAK No.16 (2018).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. PLN (Persero) UP3 Binjai mengenai perlakuan akuntansi terhadap aset tetap berwujud berdasarkan PSAK No.16 Tahun 2018 yaitu perbandingan perlakuan akuntansi dengan pengakuan, pengukuran, pelaporan, pengeluaran, penyusutan, dan penghentian aset tetap atau berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.2 sampai tabel 4.7 telah didapat bahwa masih ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada PSAK No.16 Tahun 2018.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

PT. PLN (Persero) adalah perusahaan BUMN penyedia tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah yang besar serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Berdasarkan pembahasan yang di lakukan terhadap akuntansi perolehan dan penyusutan aset tetap berwujud pada PT. PLN (Persero) UP3 Binjai, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. PLN (Persero) UP3 Binjai merupakan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) area Binjai atau unit pelaksana di bawah unit induk distribusi untuk area Binjai yang bergerak di bidang ketenagalistrikan untuk melayani masyarakat.
2. PT. PLN (Persero) UP3 Binjai mengelompokkan aset tetapnya menjadi beberapa jenis, yaitu : tanah dan hak atas tanah, bangunan dan kelengkapan halaman, instalasi dan mesin, perlengkapan penyaluran tenaga listrik, jaringan distribusi, gardu distribusi, perlengkapan lain-lain distribusi, perlengkapan pengolahan data, perlengkapan telekomunikasi, perlengkapan umum, serta kendaraan bermotor dan alat-alat yang mobil.
3. PT. PLN (Persero) UP3 Binjai memperoleh asetnya dengan 2 cara perolehan, yaitu :
 - a. Dari Pekerjaan Dalam Penyelesaian (PDP)
 - b. Kapitalisasi Biaya Pemeliharaan

4. PT.PLN (Persero) UP3 Binjai menggunakan metode garis lurus (straingt line method), dimana harga perolehan aset tetapnya akan dikurangi dengan nilai residu kemudian dibagi dengan umur manfaat aset tetap itu sendiri untuk metode penyusutannya.
5. Penetapan masa manfaat untuk setiap aset tetap di PT.PLN (Persero) UP3 Binjai berdasarkan pada identifikasi fisik serta pengalaman masa lalu atas aset yang sejenis.
6. Perlakuan serta penerapan akuntansi pada aset tetap berwujud di PT.PLN (Persero) UP3 Binjai dimulai dari pengakuan, pengukuran, pengeluaran, penyusutan dan penghentian sudah berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Tahun 2018. Namun masih ada yang harus disesuaikan dengan PSAK No.16 (2018) terutama dalam hal pelaporan / penyajian aset tetap di laporan keuangan.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan atas perlakuan akuntansi terhadap aset tetap berwujud pada PT.PLN (Persero) UP3 Binjai, penulis mencoba memberikan beberapa saran yang mungkin dapat membantu, antara lain :

1. Penerapan perlakuan akuntansi pada aset tetap berwujud di PT.PLN (Persero) UP3 Binjai yang telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Tahun 2018 hendaknya harus terus dipertahankan agar lebih efektif.

2. Perusahaan hendaknya mencatat aset tetap di dalam neraca secara terpisah dan terperinci berdasarkan kelompoknya masing-masing agar para pembaca laporan keuangan bisa memperoleh informasi yang jelas dan akurat dari suatu kelompok aset tetap yang ingin diketahuinya.
3. Perusahaan hendaknya menambahkan informasi mengenai dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan pada laporan keuangan agar lebih informatif, sehingga laporan keuangan lebih mudah untuk dimengerti oleh penggunanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S. (2018). Analisis faktor faktor yang mempengaruhi pengungkapan modal intelektual pada laporan tahunan perusahaan non keuangan yang terdaftar di bursa efek indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 23-34.
- Dunia, Firdaus A. 2014. *Pengantar Akuntansi Edisi Empat*. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Dwilita, H. (2019). Perbandingan Kinerja Perbankan Indonesia Studi Pada Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2017. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 145-162.
- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi English For Specific Purpose (Esp) Di Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab) Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 190-201.
- Fadly, Y. (2015). Kondisi dan Kritik Sosial pada Masa Rezim Orde Baru dalam Puisi-Puisi WS Rendra.
- Gunawan, Faisal, 2016. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No.16 Pada Glory Futsal Sukowono. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember. Jember.
- Hasibuan, H. A., Purba, R. B., & Siahaan, A. P. U. (2016). Productivity assessment (performance, motivation, and job training) using profile matching. *SSRG Int. J. Econ. and Management Stud*, 3(6).
- Hasransyah, Gerry. Asmapane, Set. Diyanti, Ferry. 2017. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan. *Jurnal Kinerja*. Vol.14, No.1, Hal 31-39.
- Hidayat, R. Rusiadi, dan M. Isa Indrawan. 2014. *Teknik Proyeksi Bisnis*. USU. Press
- Hidayat, R. (2018). Kemampuan Panel Auto Regressiv Distributed Lag Dalam Memprediksi Fluktuasi Saham Property And Real Estate Indonesia. *JEpa*, 3(2), 133-149.
- Hidayat, R., & Subiantoro, N. Rusiadi. 2013. *Metode Penelitian*. USU Press.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2018. ED PSAK 16 (2018). Dewan Standar, Akuntansi Keuangan. Jakarta.
- Indriantoro, N. Dan Supomo, B. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPF. Yogyakarta.
- Kartikahadi. 2012. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Jakarta: Salemba Empat.
- KBBI, 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). Available at :

<https://www.jagokata.com/> Diakses tanggal 12 November 2019. Kusnadi, 2012. *Pengantar Akuntansi Keuangan 2*. Malang Taroda.

Martani, Dwi dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Buku 1, Jakarta : Salemba Empat.

Megawati, Enti. Suhadak. Dzulkirom, Moch. 2014. Perlakuan Akuntansi Atas Aktiva Tetap Berwujud dan Penyajiannya Pada Laporan Keuangan (Studi Pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Pabrik Gula Meritjan Kediri Periode 2012). *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol.17, No.2.

Mustamin, Fitrah, 2013. Analisis Pengakuan, Pengukuran, dan Pelaporan Aktiva Tetap Berdasarkan PSAK No.16. *Jurnal EMBA*. Vol.1, No.3, Hal 401-409.

Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Maisyarah, R., & Sofyardi, M. (2018, January). The Effect of Rice Subsidyon The Expenditure of Public Family Consumption And Welfare of Poor Households. In 1st Economics and Business International Conference 2017 (EBIC 2017). Atlantis Press.

Reeve, dkk. 2012. *Pengantar Akuntansi*. Buku 1, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Riyanto, Yatim. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya : Penerbit SIC.

Ruata, Deisy S. Tinangon, Jantje J. Mawikere, Lidia M. 2018. Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No.16 Pada PT Bank Maluku Malut Cabang Tobelo. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol.13, No.2, Hal 476–485.

Rudhi, Prasetya. 2011. *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*. Jakarta : Sinar Grafika.

Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta : Erlangga. Rudianto. 2017. *Akuntansi Intermediate*. Jakarta Erlangga.

Rianto, H. (2019). Produk Asuransi Syariah Prudential (Pru Link Syariah) Dalam Tinjauan Syariat Islam. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).

Rianto, H., Olivia, H., & Siregar, S. (2019). Islamic Family Financial Management. In *Proceeding International Seminar on Islamic Studies* (Vol. 1).

Ritonga, M. (2018). Faktor manajemen biaya dan manajemen pemasaran terhadap pendapatan melalui intensitas produksi pada ukm industri rumahan di kota binjai. *Jumant*, 8(2), 68-78.

Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (Fintech) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan. *Kajian Akuntansi*, 19(1), 09-18.

Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index. *Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.

- Supraja, G. (2019). Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan efektivitas Fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten deli serdang. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 115-130.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. CV. Alfabeta.
- Tohirin. 2013. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis integrasi) Edisi Revisi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Syauqi, T. R. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Auditor dengan Pengalaman Kerja Auditor sebagai Variabel Moderating pada Auditor Kantor Akuntan Publik di Medan.
- Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta : Penerbit Genesis.
- Wahyudi, Heri. 2014. Analisis Perlakuan Aktiva Tetap Pada PT Bhandha Ghara
- Reksa Medan. *Jurnal Bisnis Administrasi*. Vol.3, No.2, Hal 31-41. Wibowo dan Abu Bakar. 2018. *Akuntansi Keuangan Dasar 2*. Edisi Ketiga : Cikal Sakti. Jakarta.
- Yantika, Novi. 2017. Penerapan Konvergensi IFRS Pada PSAK No.16 Atas Aset Tetap Berwujud Pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk dan Entitas Anak. *Jurnal Finacc*. Vol.1, No.11.
- Yusuf. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana.
- Zuldafrial. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Yuma Pustaka.
- <https://www.onoini.com/pengertian-aset-tetap/>, Diakses tanggal 08 November 2019.
- <https://www.dosenpendidikan.co.id/aset-tetap-adalah/> Diakses tanggal 08 November 2019.
- <http://mangihot.blogspot.com/2016/12/definisi-dan-klasifikasi-aset-tetap.html> Diakses tanggal 08 November 2019.
- <https://www.jagokata.com/> Diakses tanggal 12 November 2019.
- <https://fakhrianshori.wordpress.com/tag/pengakuan-aset-tetap/> Diakses tanggal 12 November 2019.
- <https://www.pen-akuntansi-ii-pengehentian-aktiva.thtml>, Diakses tanggal 14 November 2019.